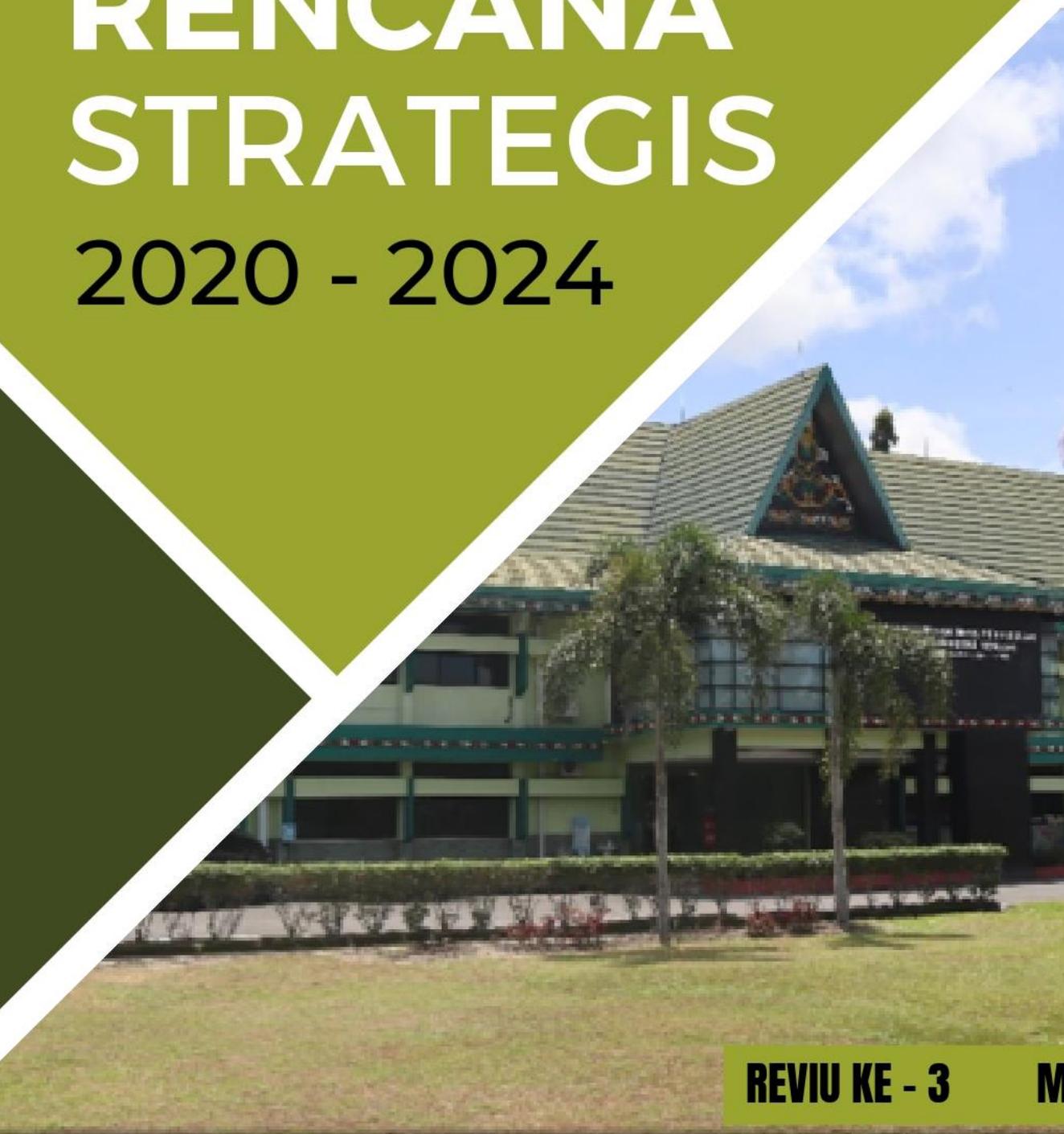


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



REVIU KE - 3

MARET 2023



bpmpkalteng.kemdikbud.go.id



BPMP Kalteng



[bmp_kalteng](https://www.instagram.com/bmp_kalteng)



BPMP Kalteng



ULT 08115234400

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya, maka reviu Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Renstra ini dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan hambatan yang kemungkinan timbul agar visi, misi tujuan/sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Selanjutnya dengan disusunnya Renstra ini diharapkan akan memberikan arah dan pedoman bagi lembaga dalam menyusun dan mengelola perencanaan program-program penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini akan direviu untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang positif dan relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan jaman.



Palangka Raya, 29 Maret 2023

Kepala,

Dr. Tomy Haridjaya, S.sos., M.M.

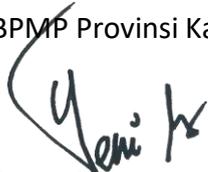
NIP. 197010192002121002



LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024

Diajukan Oleh	Tim SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah  Yenny Mayaningsih, S.T. NIP 197903092003122001
Diperiksa Oleh	Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Tengah,  Hanityo Muktiarso, S.H. NIP 197111012005011002
Disetujui Oleh	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah,  Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M. NIP 197010192002121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan.....	4
1.2. Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan	32
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan	53
2.1. Visi.....	53
2.2. Misi.....	54
2.3. Tata Nilai	54
2.4. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis	56
2.5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	57
2.6. Target Capaian Reformasi Birokrasi	58
Bab III Arah kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan	61
3.1. Arah Kebijakan.....	61
3.2. Strategi	61
3.3. Kerangka Regulasi	63
3.4. Kerangka Kelembagaan	64
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	66
4.1 Target Kinerja	66
4.2. Kerangka Pendanaan	68
Bab V Penutup.....	70
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang- Undang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan dipandang sebagai usaha sadardan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan

delapan standar nasional pendidikan, terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Fokus pembangunan pendidikan nasional menggambarkan bahwa orientasi pengelolaan pendidikan adalah pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai landasan dalam meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Menyikapi fenomena yang terjadi, seiring dengan tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan dan *output* yang memiliki daya saing tinggi, pada masa yang akan datang supaya semua satuan pendidikan sudah mencapai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Indikator-indikator tersebut memberikan arah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Dengan diimplementaskannya SPM maupun SNP pada setiap satuan pendidikan merupakan modal dasar satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan prima (*excellent service*) kepada setiap konsumen pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya dalam menjamin tercapainya akses pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) telah melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemetaan mutu, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), BPMP diberikan tanggungjawab untuk memperluas ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan yang menjadi kewenangan BPMP akan memperhitungkan hal-hal terkait Indikator Kinerja yang menjadi Target Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Renstra 2020-2024 yaitu:

- **Pertama**, Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya;
- **Kedua**, Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen);
- **Ketiga**, Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- **Keempat**, Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL BPMP Kalimantan Tengah.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam Permendikburistek Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dengan perencanaan yang matang, maka BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menyusun suatu rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis lembaga untuk dapat dilakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja lembaga.

BAB I Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Tengah ini terstruktur sebagai berikut:

- (a) Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2020-2024;
- (b) Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Kemendikbud 2020-2024.

1.1. KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam periode Renstra Tahun 2015-2019, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pencapaian 8 SNP serta meningkatkan tatakelola di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemetaan mutu, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sebagai capaian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Tengah selama periode Renstra 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Pemetaan mutu satuan pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK) di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan sejak tahun 2016 – 2019 melalui Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) yang dikembangkan oleh Satgas PMP Ditjen Dikdasmen. Instrumen PMP berisi penilaian terhadap indikator 8 standar nasional pendidikan.



Pengisian instrumen PMP dilakukan oleh sekolah (dengan responden Kepala sekolah, guru, siswa dan komite sekolah), divalidasi oleh pengawas sekolah dan dikawal oleh BPMP. Aplikasi PMP terintegrasi dengan Dapodik dan menghasilkan Rapor Mutu Sekolah yang berisi capaian mutu Satuan pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut ini dijabarkan capaian mutu satuan pendidikan sejak tahun 2016 - 2018.



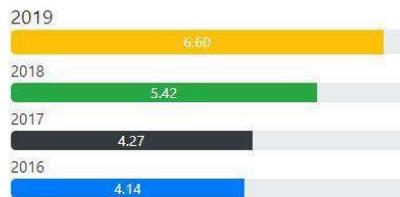
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★ SNP	6,67	7
★★★★ Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★ Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★ Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★ Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04





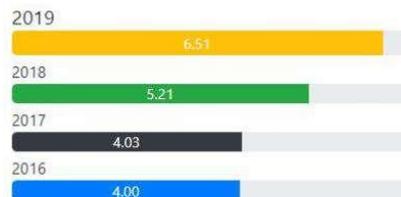
SMA

Capaian Mutu



SMK

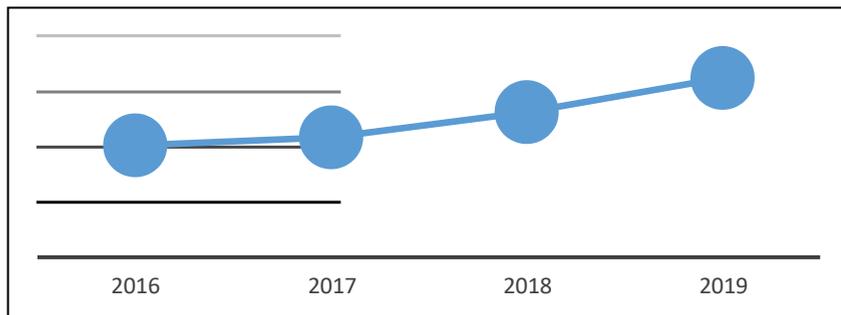
Capaian Mutu



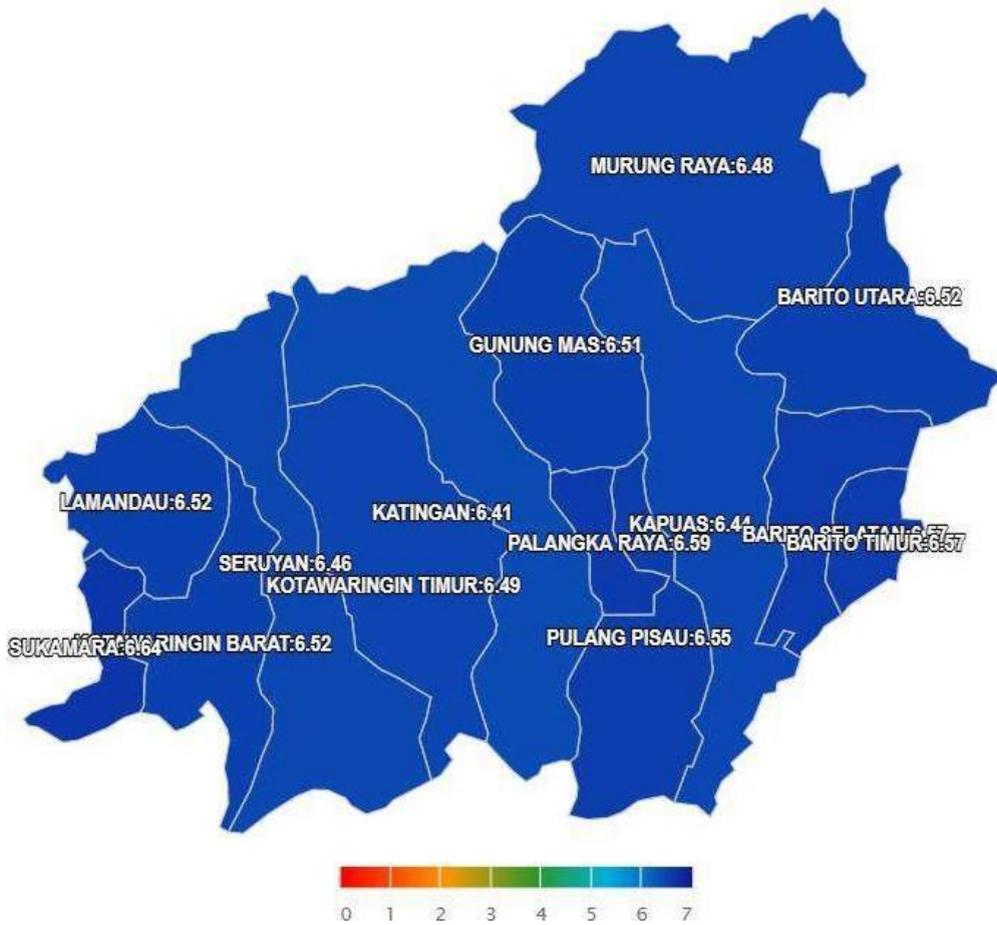
Tren capaian SNP jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata satuan pendidikan berada pada kategori menuju SNP 4

A. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD

HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD BERDASARKAN DATA PMP PER 29 AGUSTUS 2020

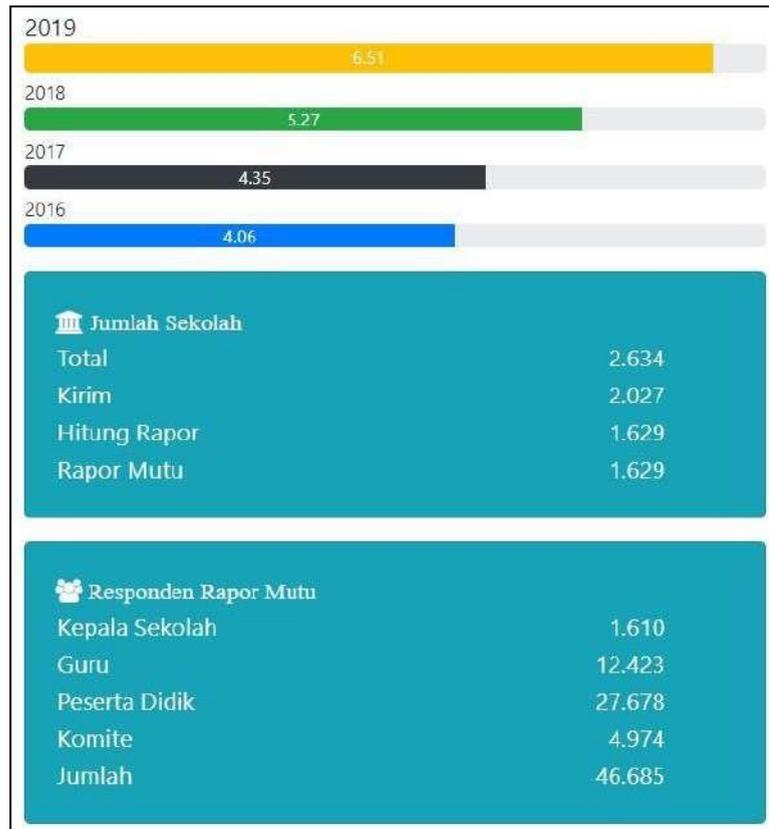


Perbandingan capaian SNP jenjang SD menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata SD berada pada kategori menuju SNP 4

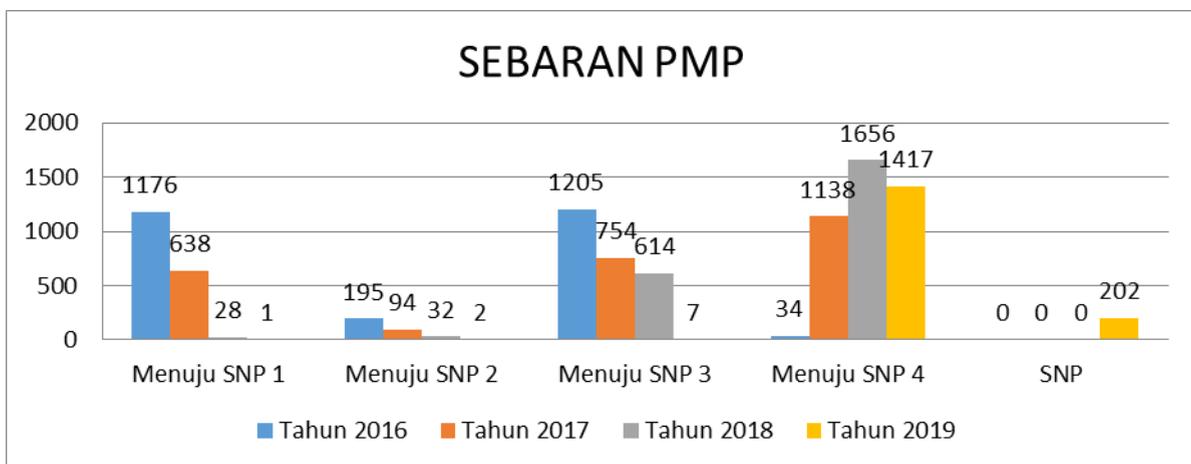


TREN PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2019





PEMETAAN MUTU JENJANG SD BERDASARKAN KATEGORI CAPAIAN SNP

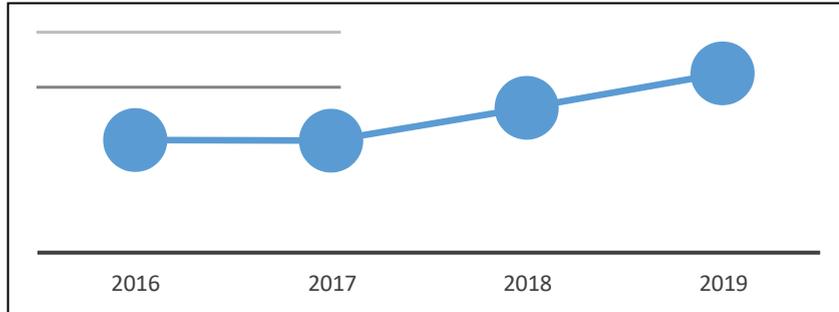


Mayoritas SD sebanyak 1.417 sekolah dari 1.629 sekolah yang data PMP-nya dapat diolah/dihitung Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4, dan di tahun 2019 sudah ada sekolah yang berada pada kategori SNP yaitu sebanyak 202 sekolah.

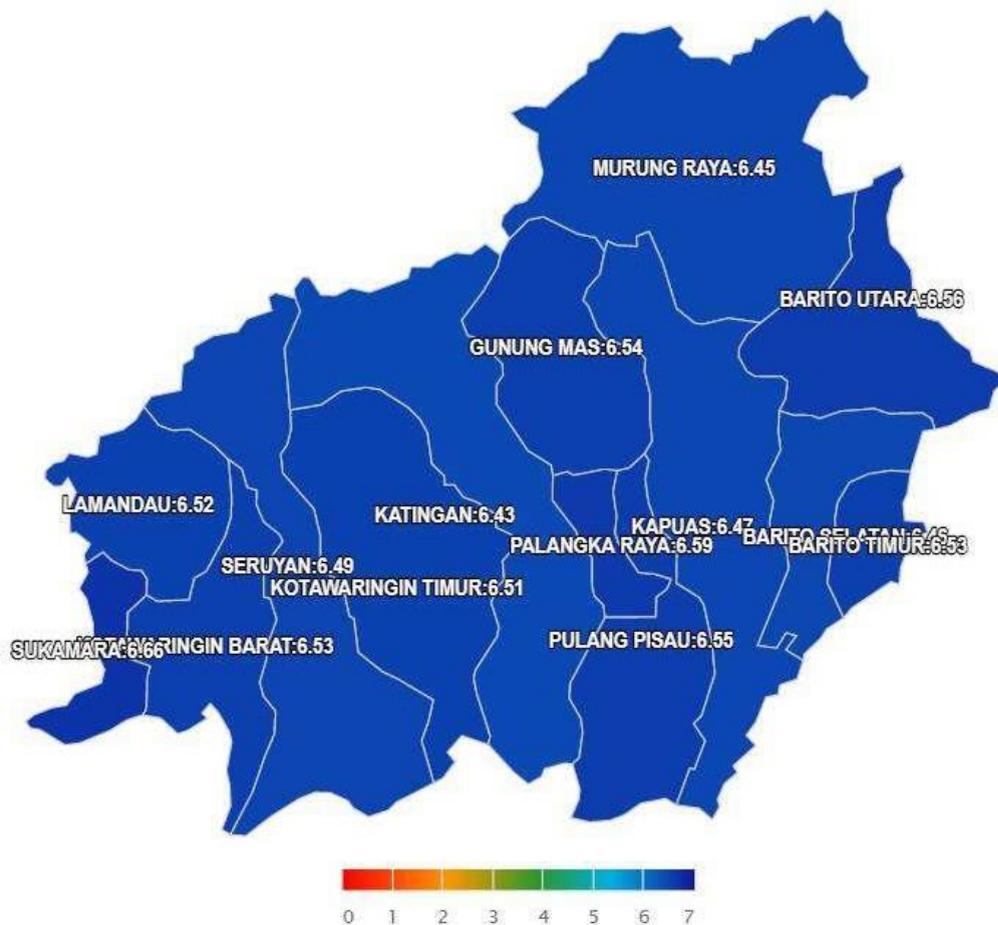
Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP 2 dan SNP 3 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 bahkan ada yang sudah mencapai SNP.

B. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

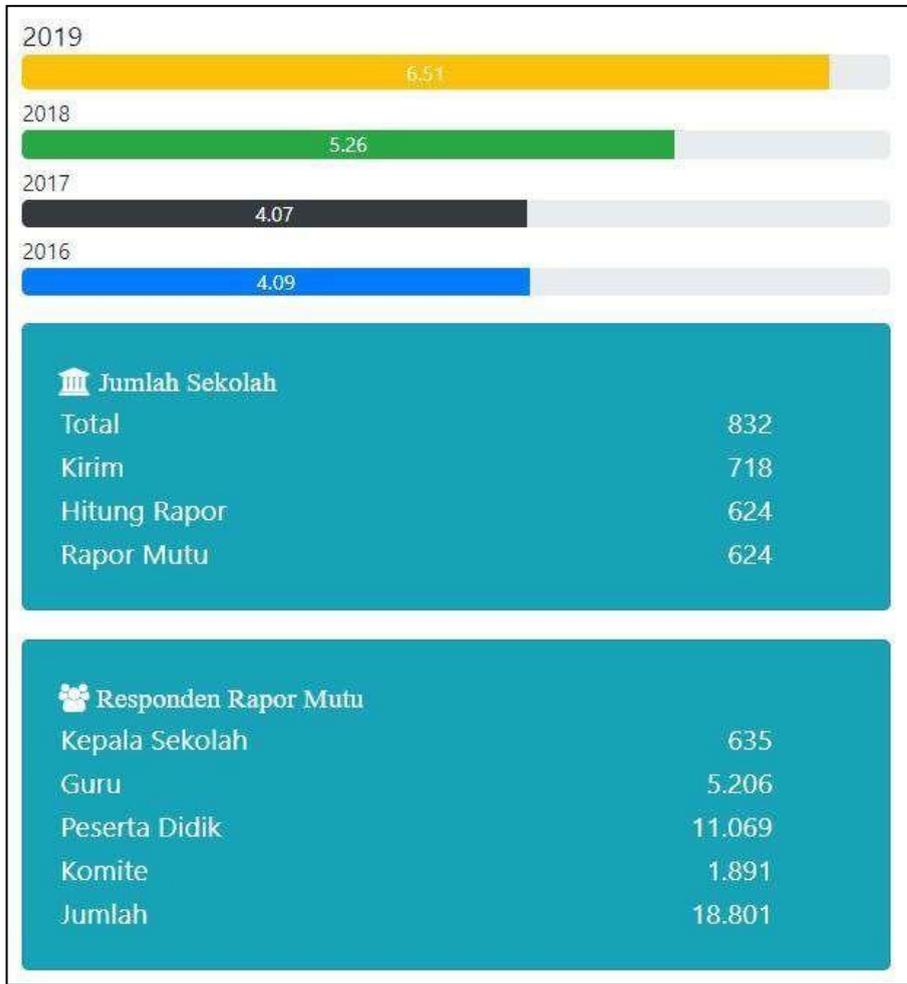
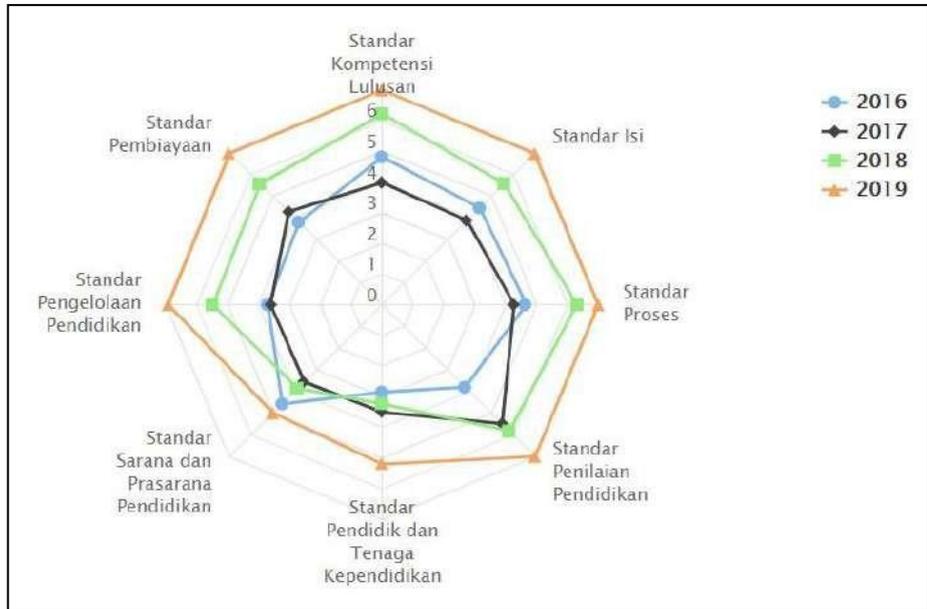
HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP BERDASARKAN DATA PMP PER 29 AGUSTUS 2020



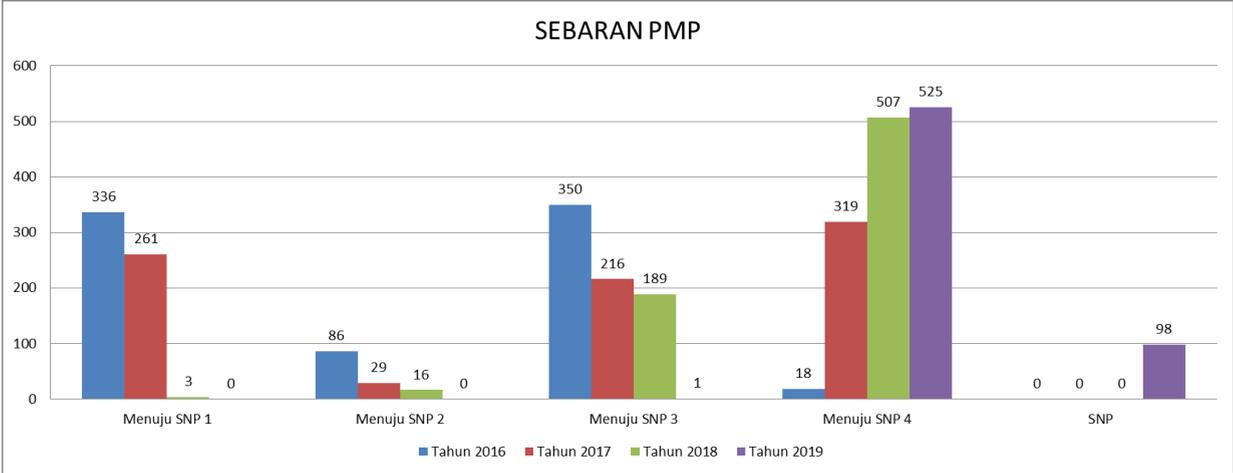
Perbandingan capaian SNP jenjang SMP menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata SMP berada pada kategori menuju SNP 4



TREN PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2019



**PEMETAAN MUTU JENJANG SMP
BERDASARKAN KATEGORI CAPAIAN SNP**

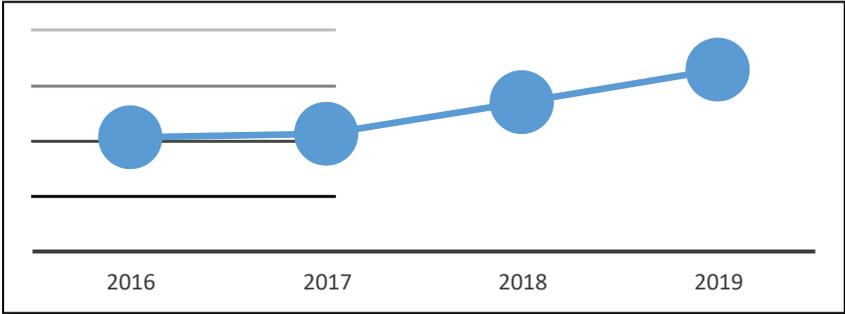


Mayoritas SMP sebanyak 525 sekolah dari 624 sekolah yang data PMP-nya dapat diolah/dihitung Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4, dan di tahun 2019 sudah ada sekolah yang berada pada kategori SNP yaitu sebanyak 98 sekolah.

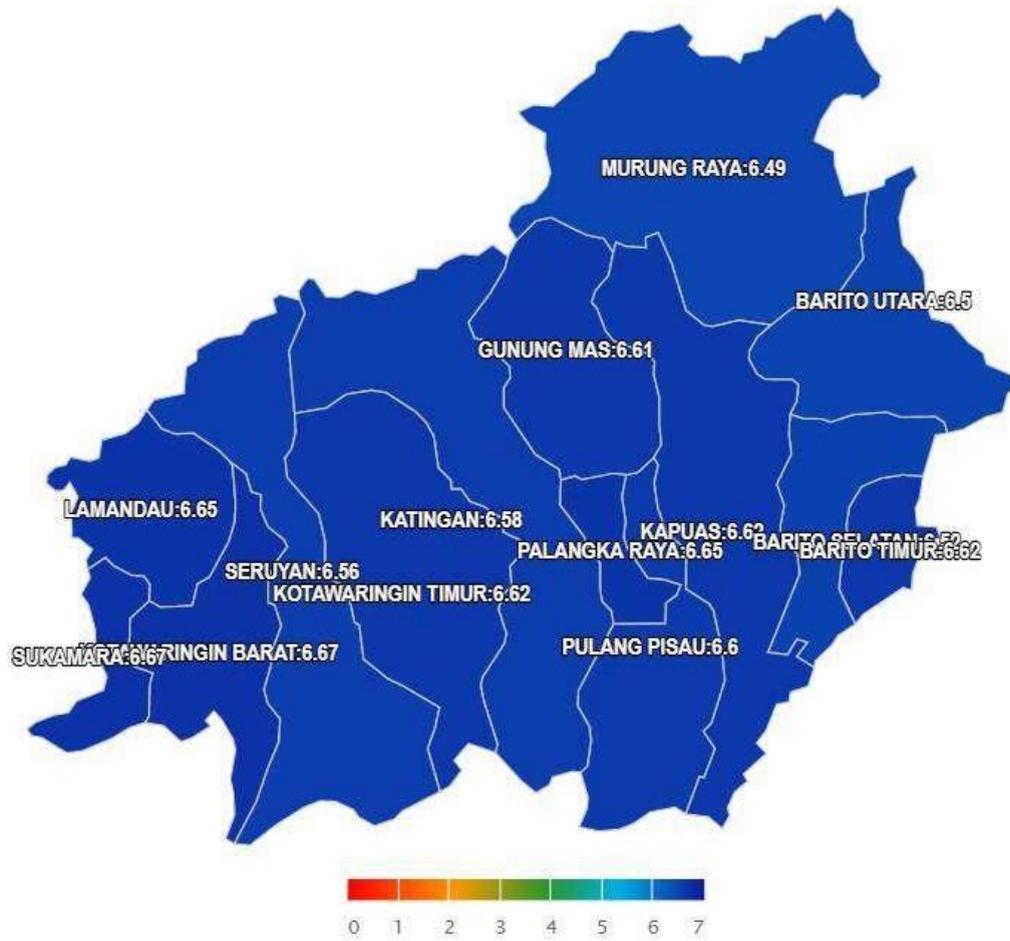
Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP 2 dan SNP 3 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 bahkan ada yang sudah mencapai SNP.

C. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA

**HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA
BERDASARKAN DATA PMP PER 29 AGUSTUS 2020**

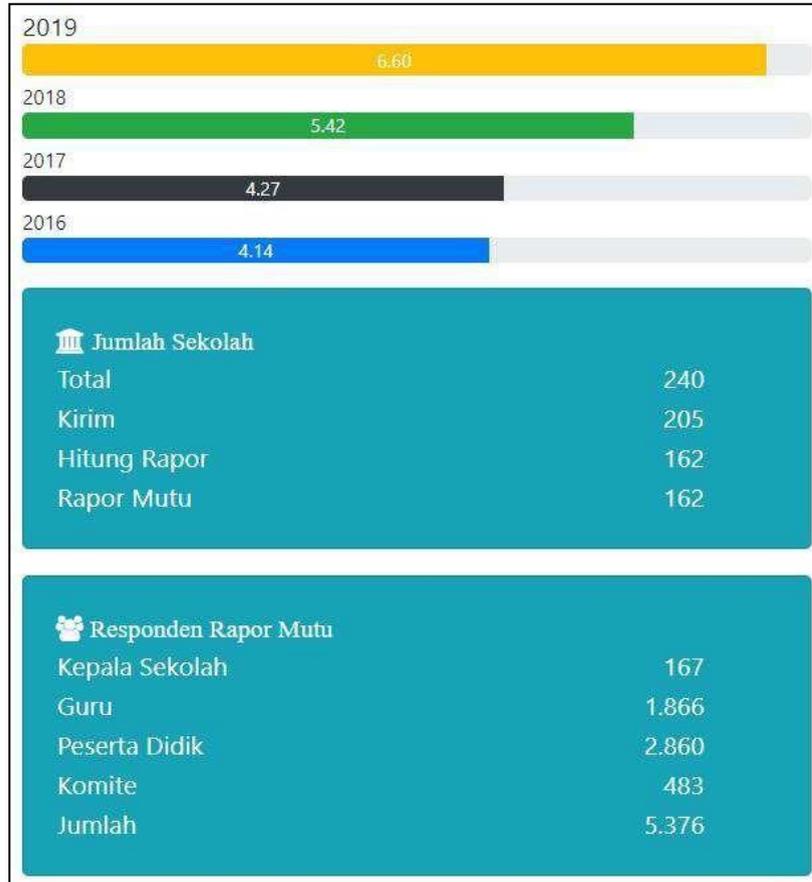


Perbandingan capaian SNP jenjang SMA menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata SMA berada pada kategori menuju SNP 4

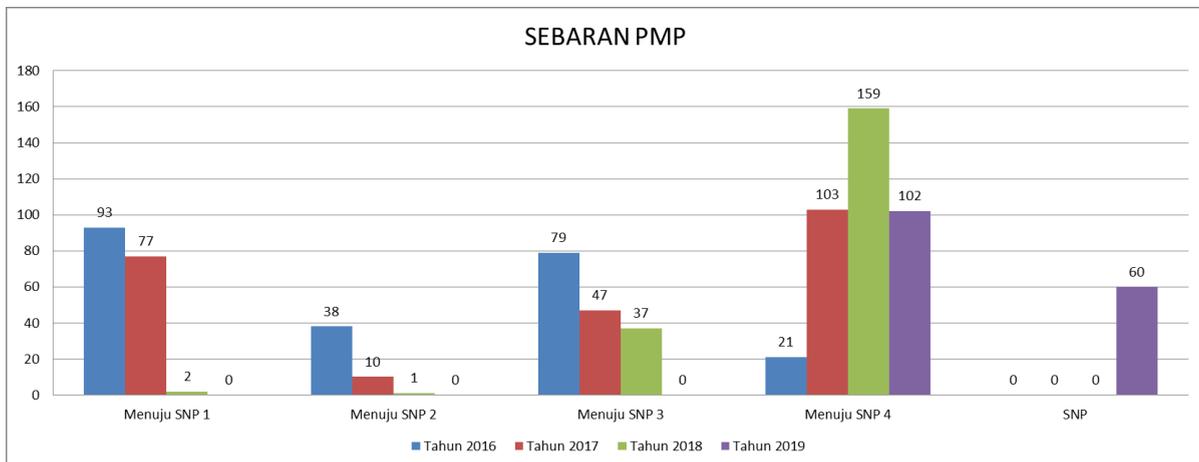


TREN PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2019





PEMETAAN MUTU JENJANG SMA BERDASARKAN KATEGORI CAPAIAN SNP



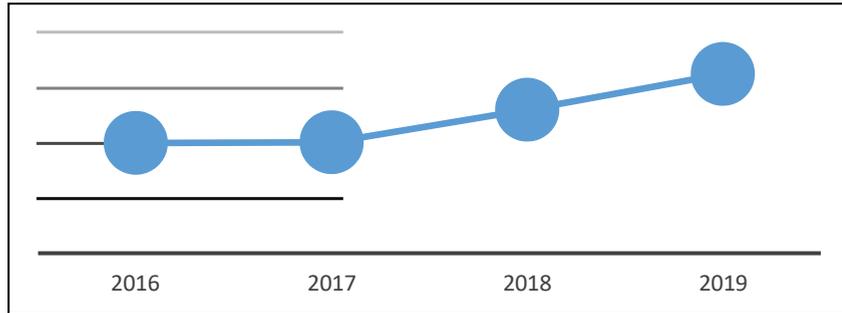
Mayoritas SMA sebanyak 102 sekolah dari 162 sekolah yang data PMP-nya dapat diolah/dihitung Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4, dan di tahun 2019 sudah ada sekolah yang berada pada kategori SNP yaitu sebanyak 60 sekolah.

Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang

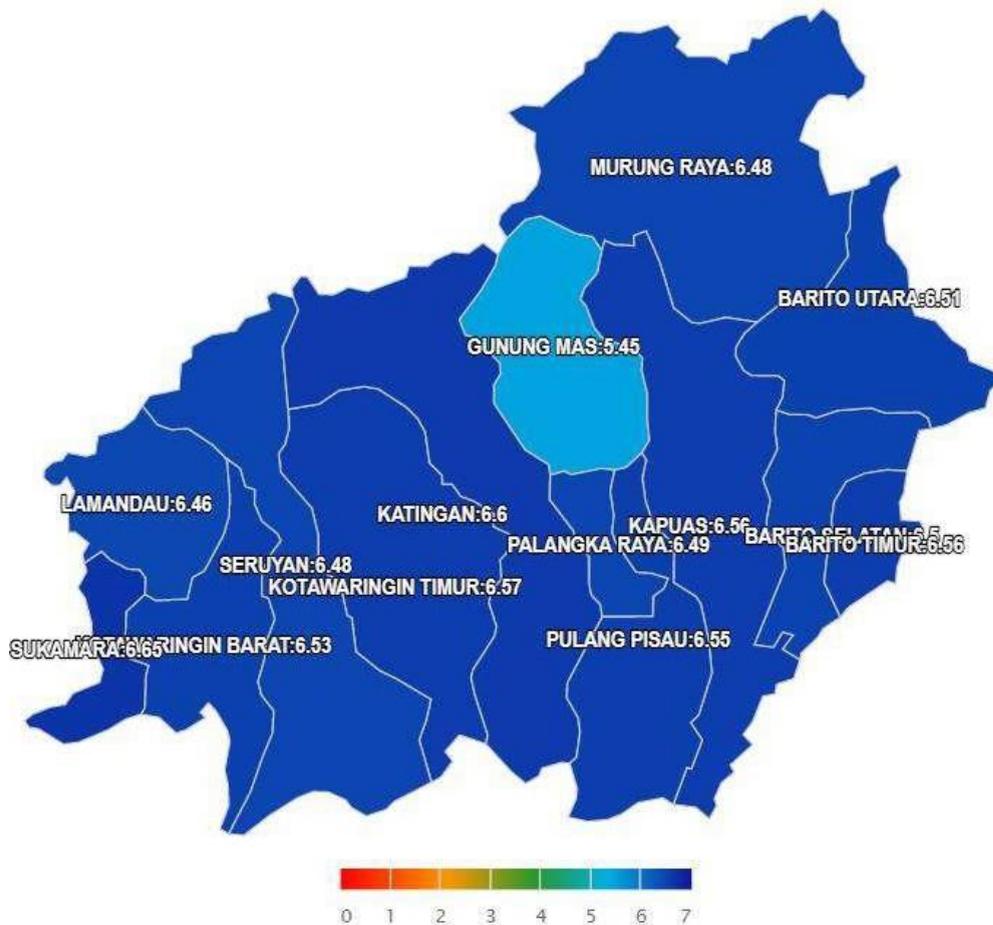
berada pada kategori menuju SNP1, SNP 2 dan SNP 3 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 bahkan ada yang sudah mencapai SNP.

D. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK

HASIL PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK BERDASARKAN DATA PMP PER 29 AGUSTUS 2020



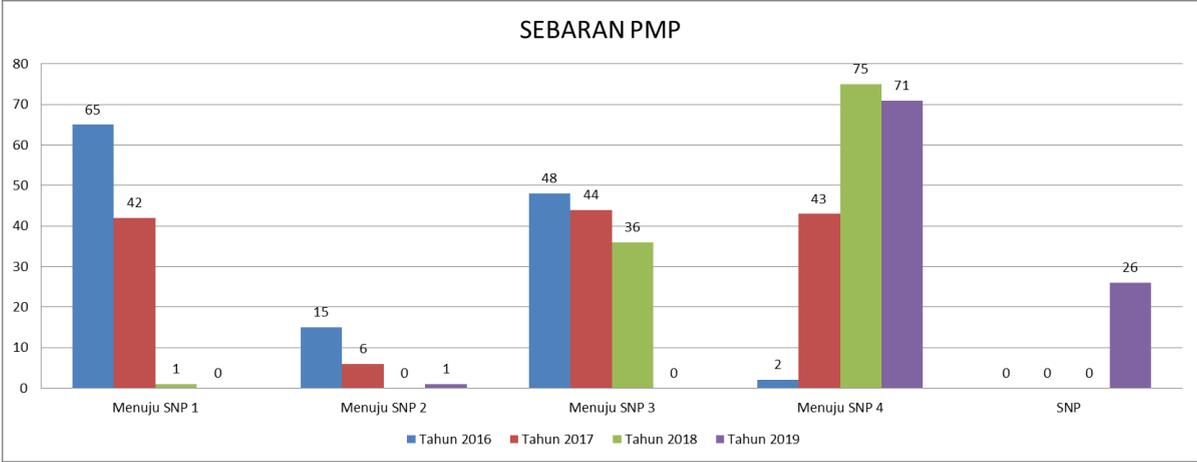
Perbandingan capaian SNP jenjang SMK menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata SMK berada pada kategori menuju SNP 4



TREN PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016-2019



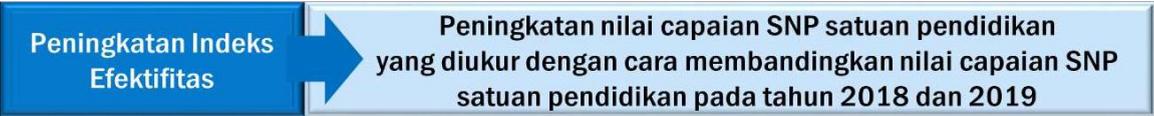
PEMETAAN MUTU JENJANG SMK BERDASARKAN KATEGORI CAPAIAN SNP



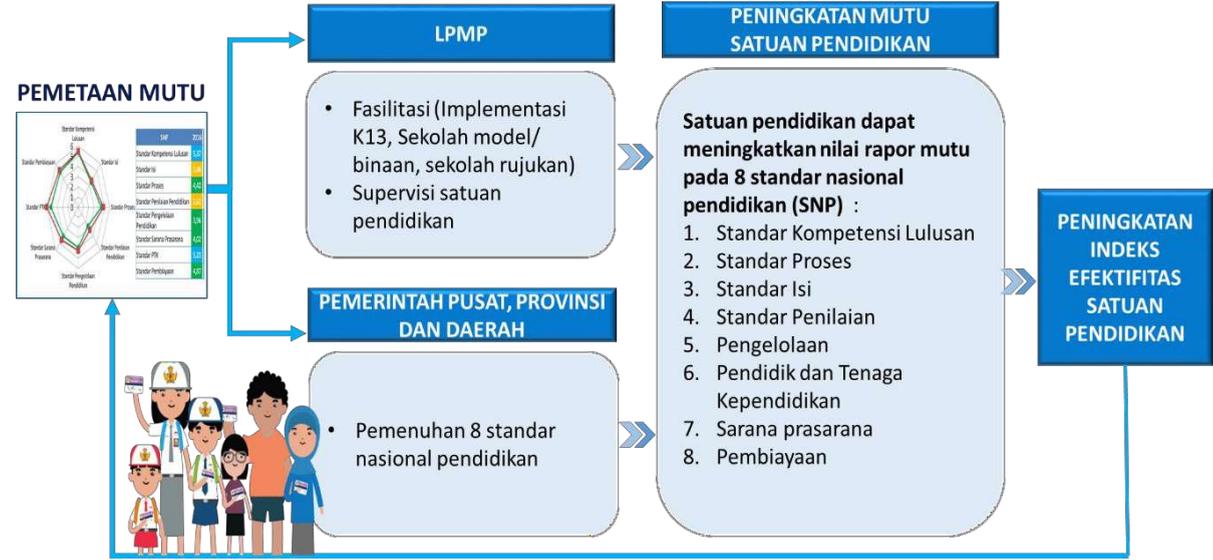
Mayoritas SMK sebanyak 71 sekolah dari 98 sekolah yang data PMP-nya dapat diolah/dihitung Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4, dan di tahun 2019 sudah ada sekolah yang beradapada kategori SNP yaitu sebanyak 26 sekolah.

Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP 2 dan SNP 3 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 bahkan ada yang sudah mencapai SNP.

2. Peningkatan Indeks Efektifitas Satuan Pendidikan

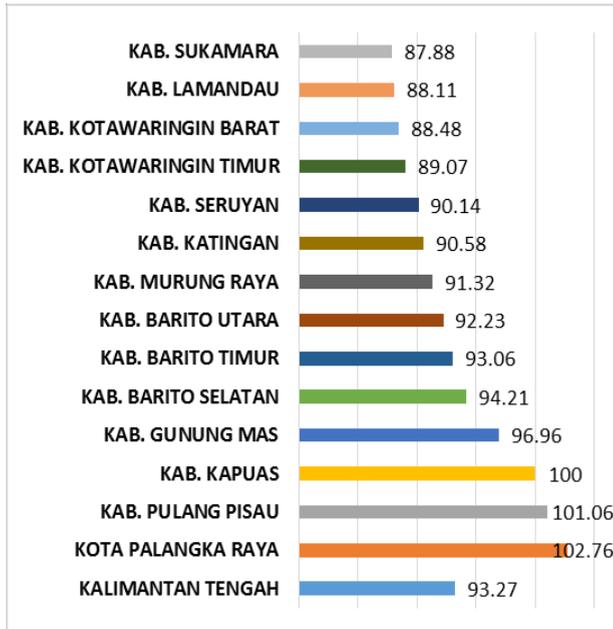


TAHAPAN KEGIATAN PENDUKUNG PENINGKATAN INDEKS EFEKTIFITAS SATUAN PENDIDIKAN



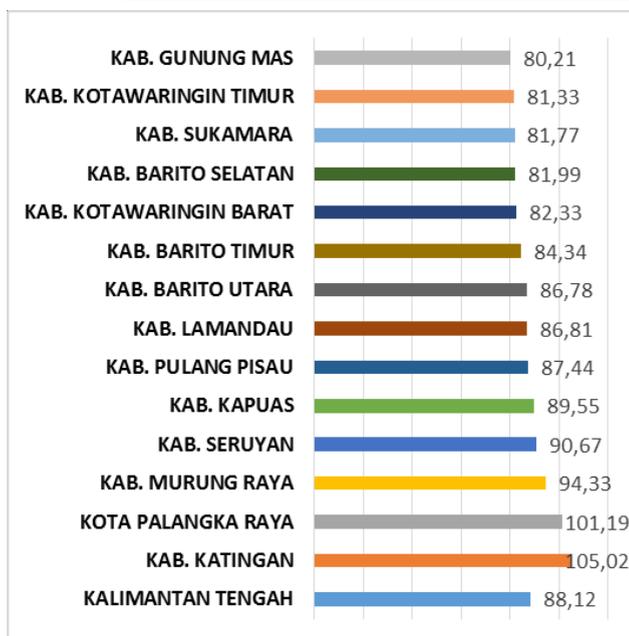
Peningkatan capaian mutu satuan pendidikan diperoleh dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPMP dan satuan pendidikan.

PERSENTASE SD YANG MENINGKAT INDEKS EFEKTIFITASNYA BERDASARKAN DATA PMP PER TANGGAL 29 AGUSTUS 2020



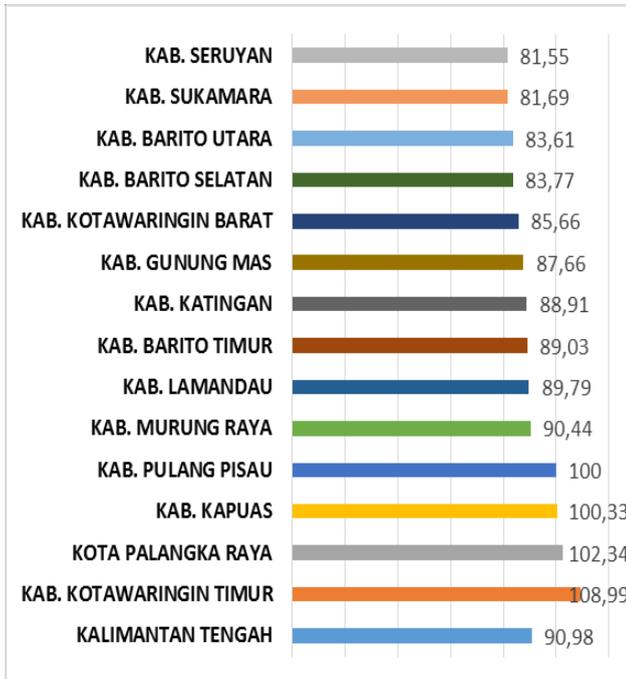
- ☐ Pada tahun 2019, ditargetkan 80% dari jumlah seluruh SD meningkat indeks efektifitasnya.
- ☐ Realisasi capaian pada beberapa Kab/Kota sudah melebihi target dengan rata-rata capaian 87,88 - 102,76%.
- ☐ Sejumlah 93,27% SD di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat indeks efektifitasnya, melebihi target sebesar 80%.

PERSENTASE SMP YANG MENINGKAT INDEKS EFEKTIFITASNYA BERDASARKAN DATA PMP PER TANGGAL 29 AGUSTUS 2020



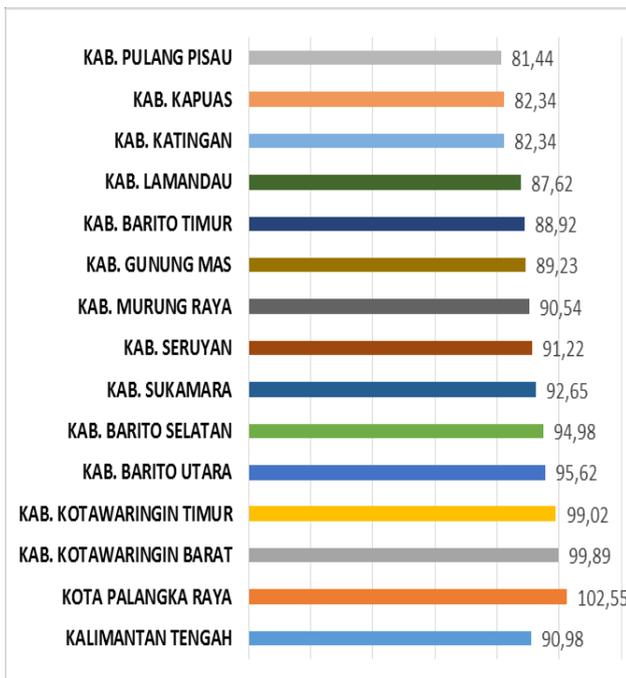
- ☐ Pada tahun 2019, ditargetkan 80% dari jumlah seluruh SMP meningkat indeks efektifitasnya.
- ☐ Realisasi capaian pada beberapa Kab/Kota sudah melebihi target dengan rata-rata capaian 80,21 - 105,02%.
- ☐ Sejumlah 88,12% SMP di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat indeks efektifitasnya, melebihi target sebesar 80%.

PERSENTASE SMA YANG MENINGKAT INDEKS EFEKTIFITASNYA BERDASARKAN DATA PMP PER TANGGAL 29 AGUSTUS 2020



- ☐ Pada tahun 2019, ditargetkan 80% dari jumlah seluruh SMA meningkat indeks efektifitasnya.
- ☐ Realisasi capaian pada beberapa Kab/Kota sudah melebihi target dengan rata-rata capaian 81,55 - 108,99%.
- ☐ Sejumlah 90,98% SMA di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat indeks efektifitasnya, melebihi target sebesar 80%.

PERSENTASE SMK YANG MENINGKAT INDEKS EFEKTIFITASNYA BERDASARKAN DATA PMP PER TANGGAL 29 AGUSTUS 2020



- ☐ Pada tahun 2019, ditargetkan 80% dari jumlah seluruh SMK meningkat indeks efektifitasnya.
- ☐ Realisasi capaian pada beberapa Kab/Kota sudah melebihi target dengan rata-rata capaian 81,44 - 102,55%.
- ☐ Sejumlah 90,98% SMK di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat indeks efektifitasnya, melebihi target sebesar 80%.

Grafik peningkatan indeks efektifitas menunjukkan adanya peningkatan capaian mutu satuan pendidikan, Namun BPMP tidak mempunyai kontribusi langsung terhadap capaian SNP pada seluruh Standar Nasional Pendidikan. Pemenuhan dan peningkatan capaian beberapa Standar Nasional Pendidikan (SNP) berada diluar kewenangan BPMP seperti standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan pemenuhan kualifikasi akademik standar pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan

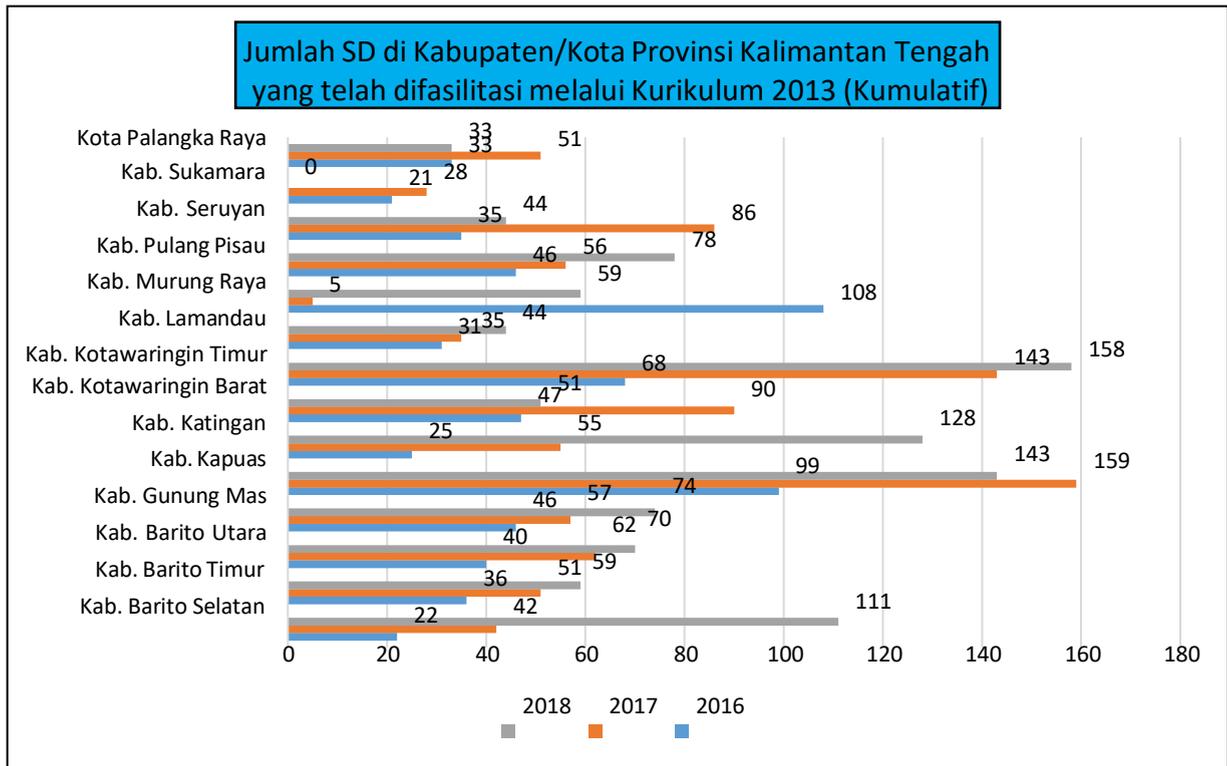
Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan dilaksanakan sejak tahun 2016 - 2019 melalui program Implementasi Kurikulum 2013, Sekolah menuju SNP (Sekolah model/binaan), Pengembangan PPK, dan Supervisi satuan pendidikan.

1 FASILITASI MELALUI KURIKULUM 2013

JENJANG SD

Tahapan fasilitasi satuan pendidikan jenjang SD melalui kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2015 sebagai tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada semua kelas. Pada tahun 2017 memasuki tahap implementasi jumlah sekolah sasaran bertambah menjadi 19% pada kelas 1 dan 4, dan pada tahun 2018 memasuki tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah 35 % pada kelas 1,2,4, dan 5 SD. Pada tahun 2018, guru sekolah sasaran yang dilatih berjumlah 4 orang dari tiap sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru kelas 1, guru kelas 4 dan guru agama. Kemudian melalui efisiensi anggaran dari pelaksanaan kurikulum 2013, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 bagi guru kelas 2 dan 5 SD serta guru PJOK.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan fasilitasi Kurikulum 2013. Semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali, untuk jenjang SD pada kelas I dan IV. Sampai dengan tahun 2020 semua jenjang dan semua kelas sudah mengimplementasikan kurikulum 2013.



FASILITASI MELALUI KURIKULUM 2013 JENJANG SD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018
Kab. Barito Selatan	22	42	111
Kab. Barito Timur	36	51	59
Kab. Barito Utara	40	62	70
Kab. Gunung Mas	46	57	74
Kab. Kapuas	99	159	143
Kab. Katingan	25	55	128
Kab. Kotawaringin Barat	47	90	51
Kab. Kotawaringin Timur	68	143	158
Kab. Lamandau	31	35	44
Kab. Murung Raya	108	5	59
Kab. Pulang Pisau	46	56	78
Kab. Seruyan	35	86	44
Kab. Sukamara	21	28	0
Kota Palangka Raya	33	51	33
Provinsi Kalimantan Tengah	657	920	1052

Dari grafik dan tabel di atas, bahwa untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui kurikulum 2013 jenjang SD dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan sekolah sehingga pada tahun 2018 sebanyak 1.052 sekolah jenjang SD yang

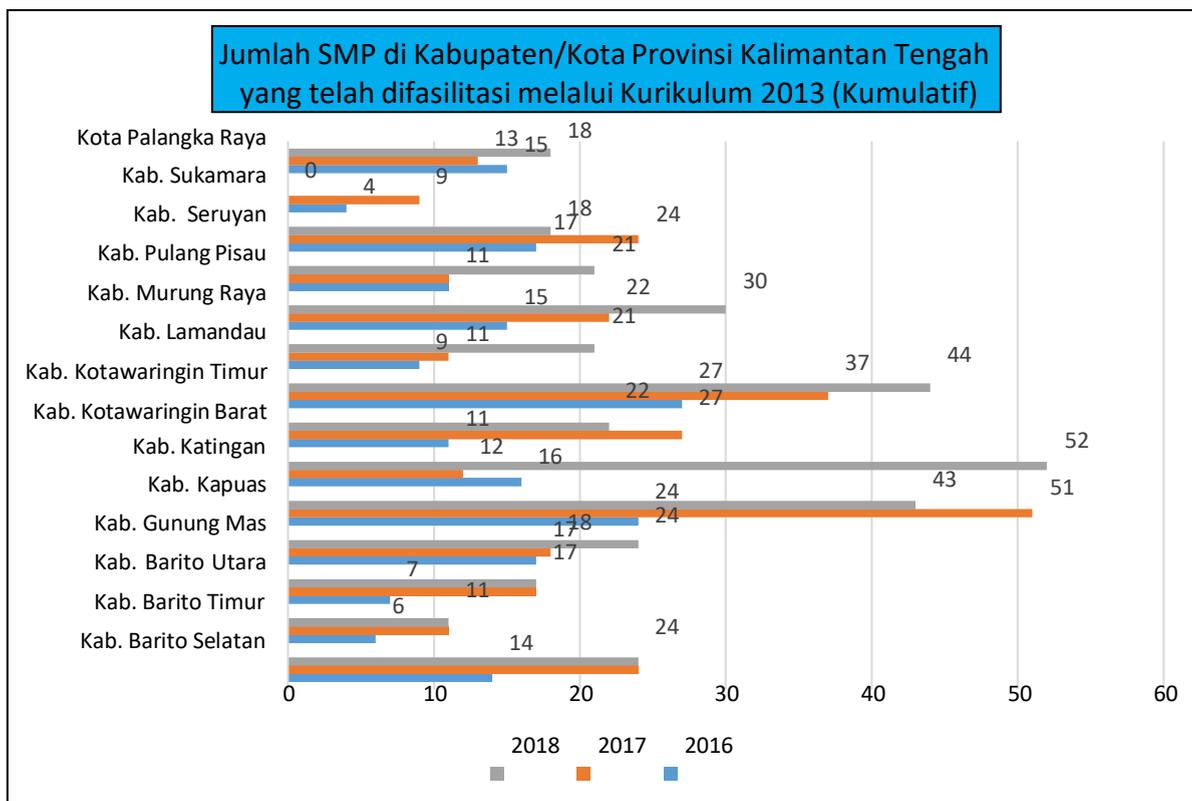
telah difasilitasi dengan Kurikulum 2013.

JENJANG SMP

Tahapan fasilitasi satuan pendidikan jenjang SMP melalui kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2015 – 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahun 2015 sebagai tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada semua kelas,
2. Tahun 2016 memasuki tahap implementasi jumlah sekolah sasaran bertambah menjadi 19% pada kelas 7,
3. Tahun 2017 memasuki tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah 35 % pada kelas 7 dan 8 SMP.
4. Tahun 2018 sejumlah 40% terdiri dari guru sekolah sasaran jenjang SMP yang dilatih berjumlah 13 orang yang terdiri dari mapel : pendidikan agama islam, pendidikan agama katolik, pendidikan agama kristen, pendidikan agama budha, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, PJOK dan Prakarya.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan fasilitasi Kurikulum 2013. Semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali, untuk jenjang SMP pada Kelas VII. Sampai dengan tahun 2020 semua jenjang dan semua kelas sudah mengimplementasikan kurikulum 2013.



FASILITASI MELALUI KURIKULUM 2013 JENJANG SMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018
Kab. Barito Selatan	14	24	24
Kab. Barito Timur	6	11	11
Kab. Barito Utara	7	17	17
Kab. Gunung Mas	17	18	24
Kab. Kapuas	24	51	43
Kab. Katingan	16	12	52
Kab. Kotawaringin Barat	11	27	22
Kab. Kotawaringin Timur	27	37	44
Kab. Lamandau	9	11	21
Kab. Murung Raya	15	22	30
Kab. Pulang Pisau	11	11	21
Kab. Seruyan	17	24	18
Kab. Sukamara	4	9	0
Kota Palangka Raya	15	13	18
Provinsi Kalimantan Tengah	193	287	345

Dari grafik dan tabel di atas, bahwa untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui kurikulum 2013 jenjang SMP dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan sekolah sehingga pada tahun 2018 sebanyak 345 sekolah jenjang SMP yang telah difasilitasi dengan Kurikulum 2013.

JENJANG SMA

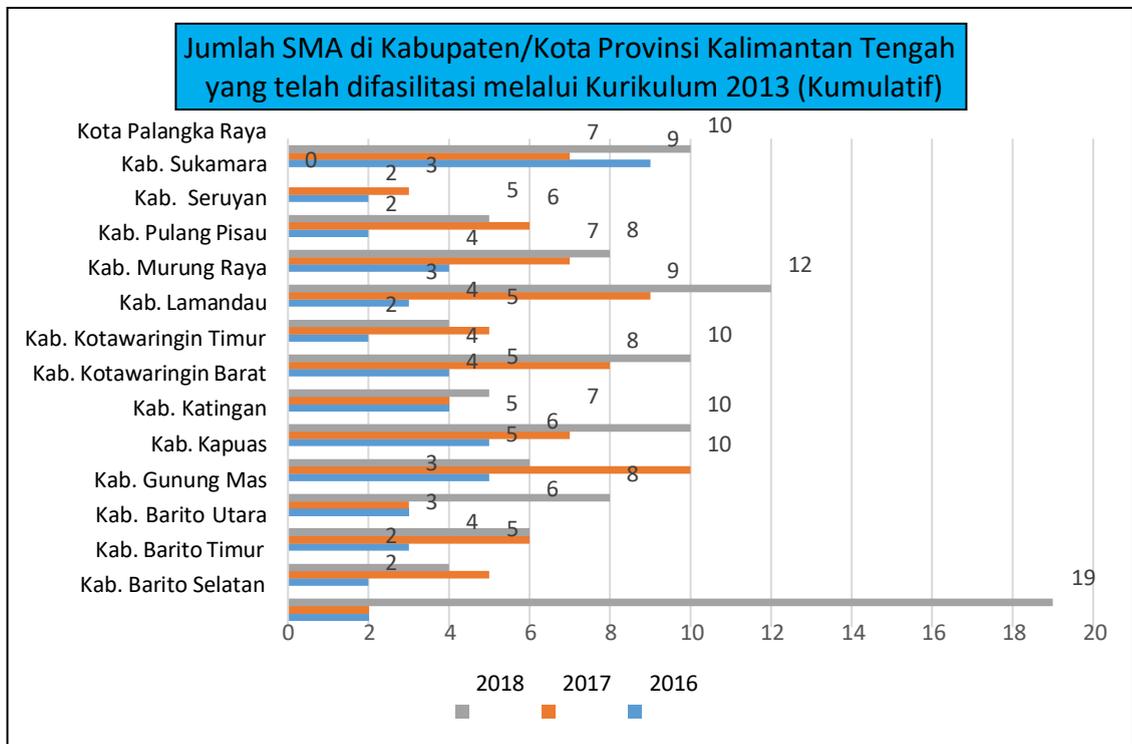
Tahapan fasilitasi satuan pendidikan jenjang SMA melalui kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2015 – 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahun 2015, sebagai tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada semua kelas,
2. Tahun 2016/2017 memasuki tahap implementasi jumlah sekolah sasaran bertambah menjadi 19% pada kelas 10,
3. Tahun 2018 memasuki tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah 35 % pada kelas 10 dan 11 SMA.

Guru sekolah sasaran jenjang SMA yang dilatih berjumlah 23 orang dari setiap sekolah yang terdiri dari mapel : Pendidikan agama Islam, Pendidikan agama kristen/katolik,

PPKn, Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya dan kewirausahaan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi Bahasa asing lainnya dan Bimbingan Konseling.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan fasilitasi Kurikulum 2013. Semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali, untuk jenjang SMA/SMK pada kelas X. Sampai dengan tahun 2020 semua jenjang dan semua kelas sudah mengimplementasikan kurikulum 2013.



**FASILITASI MELALUI KURIKULUM 2013
JENJANG SMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

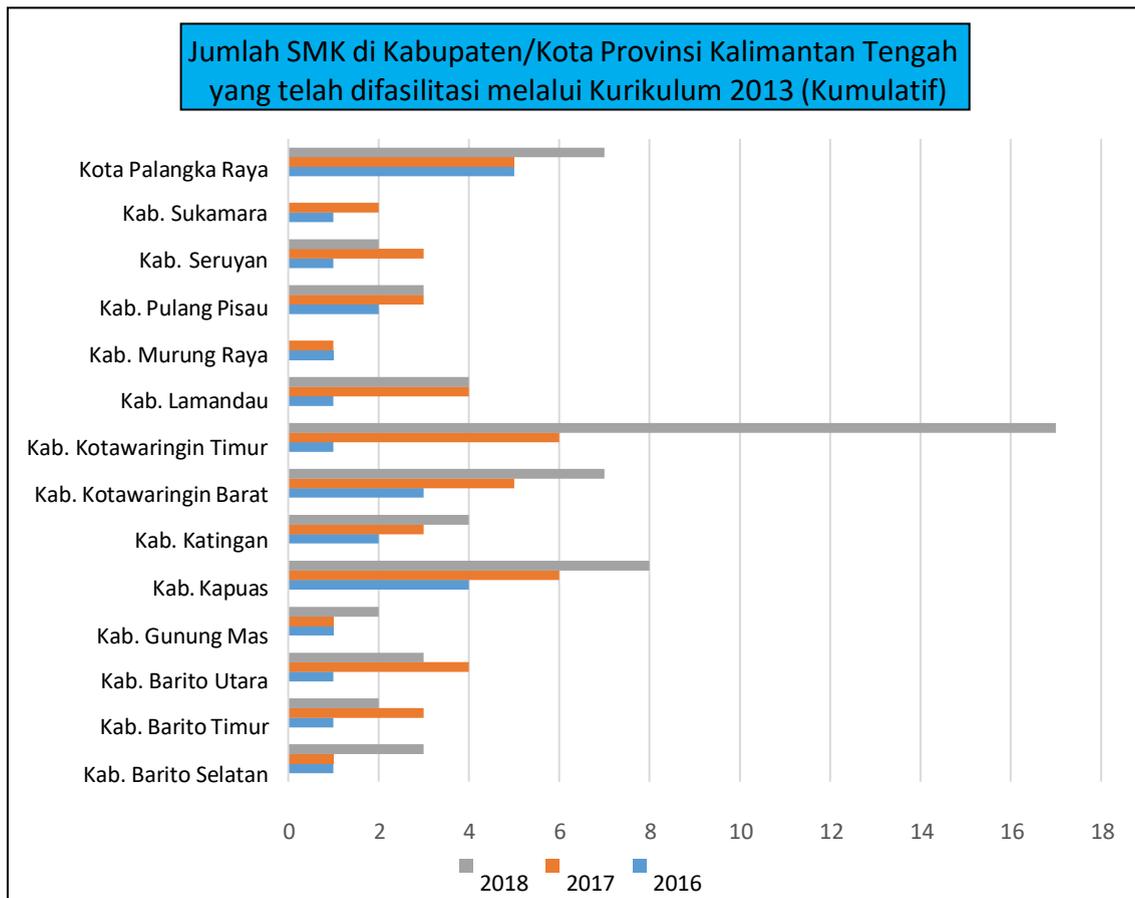
KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018
Kab. Barito Selatan	2	2	19
Kab. Barito Timur	2	5	4
Kab. Barito Utara	3	6	6
Kab. Gunung Mas	3	3	8
Kab. Kapuas	5	10	6
Kab. Katingan	5	7	10
Kab. Kotawaringin Barat	4	4	5
Kab. Kotawaringin Timur	4	8	10
Kab. Lamandau	2	5	4
Kab. Murung Raya	3	9	12
Kab. Pulang Pisau	4	7	8
Kab. Seruyan	2	6	5
Kab. Sukamara	2	3	0
Kota Palangka Raya	9	7	10
Provinsi Kalimantan Tengah	50	82	107

Dari grafik dan tabel di atas, bahwa untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui kurikulum 2013 jenjang SMA dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan sekolah sehingga pada tahun 2018 sebanyak 107 sekolah jenjang SMA yang telah difasilitasi dengan Kurikulum 2013.

JENJANG SMK

Tahapan fasilitasi satuan pendidikan melalui kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2015, sebagai tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada semua kelas, pada tahun 2017 memasuki tahap implementasi jumlah sekolah sasaran bertambah menjadi 19% pada kelas 10, dan tahun 2018 memasuki tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah 35 % pada kelas 10 dan 11 SMK. Guru sekolah sasaran yang dilatih berjumlah 12 orang dari tiap sekolah yang terdiri dari mapel : pendidikan agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Kewirausahaan, PJOK, Kelompok C1, Kelompok C2, dan Kelompok C3.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan fasilitasi Kurikulum 2013. Semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa kecuali, untuk jenjang SMA/SMK pada kelas X. Sampai dengan tahun 2020 semua jenjang dan semua kelas sudah mengimplementasikan kurikulum 2013.



FASILITASI MELALUI KURIKULUM 2013 JENJANG SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

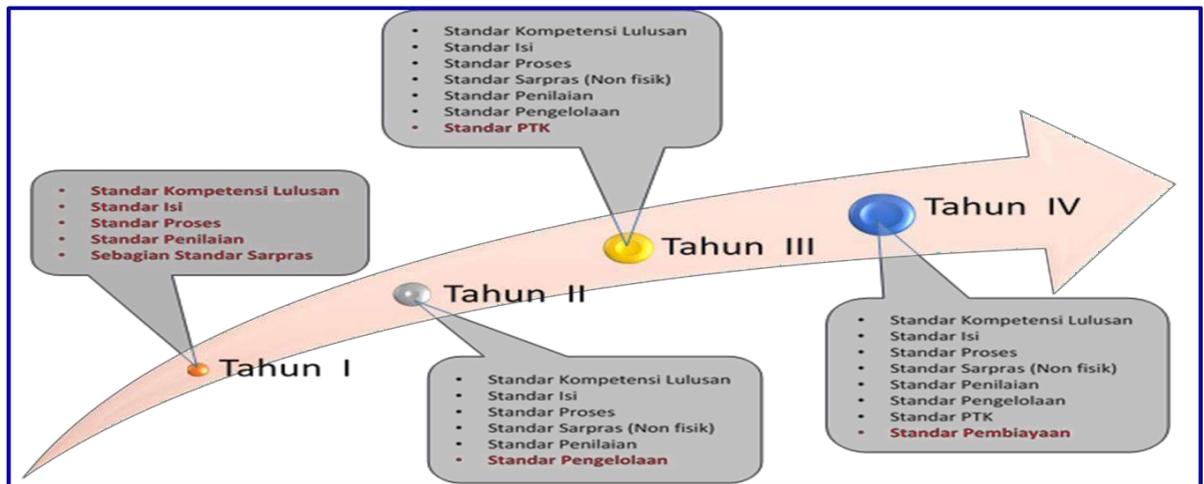
KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018
Kab. Barito Selatan	1	1	3
Kab. Barito Timur	1	3	2
Kab. Barito Utara	1	4	3
Kab. Gunung Mas	1	1	2
Kab. Kapuas	4	6	8
Kab. Katingan	2	3	4
Kab. Kotawaringin Barat	3	5	7
Kab. Kotawaringin Timur	1	6	17
Kab. Lamandau	1	4	4
Kab. Murung Raya	1	1	0
Kab. Pulang Pisau	2	3	3
Kab. Seruyan	1	3	2
Kab. Sukamara	1	2	0
Kota Palangka Raya	5	5	7
Provinsi Kalimantan Tengah	25	47	62

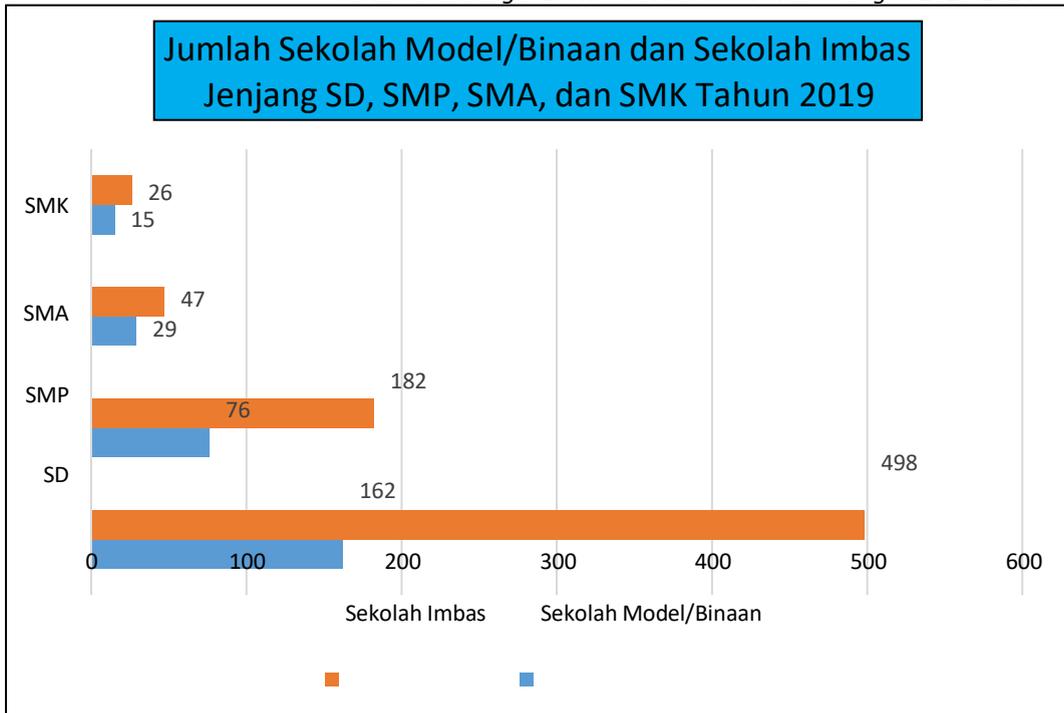
Dari grafik dan tabel di atas, bahwa untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui kurikulum 2013 jenjang SMK dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan sekolah sehingga pada tahun 2018 sebanyak 62 sekolah jenjang SMK yang telah difasilitasi dengan Kurikulum 2013.

2 FASILITASI SEKOLAH MENUJU SNP

Fasilitasi sekolah menuju SNP dilakukan melalui Program sekolah model/binaan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dengan target mengembangkan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri dan pola pengimbasan penerapannya kepada sekolah, sehingga seluruh sekolah mampu menerapkan SPMI secara mandiri.

TAHAPAN PEMENUHAN MUTU





**JUMLAH SEKOLAH MODEL/BINAAN DAN SEKOLAH IMBAS JENJANG SD,
SMP, SMA, DAN SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

Jenjang	Sekolah Model/Binaan	Sekolah Imbas	total
SD	162	498	660
SMP	76	182	258
SMA	29	47	76
SMK	15	26	41
TOTAL	282	753	1035

**JUMLAH SEKOLAH MODEL/BINAAN DAN SEKOLAH IMBAS JENJANG SD,
SMP, SMA, DAN SMK PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

WILAYAH	SEKOLAH MODEL/BINAAN					SEKOLAH IMBAS					GRAND TOTAL
	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL	
KAB. BARITO SELATAN	13	4	2	1	20	28	4	5	2	39	59
KAB. BARITO TIMUR	10	4	2	2	18	28	6	2	3	39	57
KAB. BARITO UTARA	12	4	2	1	19	22	10	2		34	53
KAB. GUNUNG MAS	11	4	2	1	18	41	14	2	1	58	76
KAB. KAPUAS	20	9	3	1	33	63	17	4	4	88	121
KAB. KATINGAN	7	7	2	2	18	17	19	6	3	45	63
KAB. LAMANDAU	7	4	2	1	14	20	20	4	2	46	60
KAB. MURUNG RAYA	7	4	2	1	14	13	5	2	1	21	35
KAB. PULANG PISAU	8	6	3		17	21	7	2		30	47
KAB. SERUYAN	8	5	2	1	16	41	25	5	2	73	89
KAB. SUKAMARA	7	4	1	1	13	35	4	1	1	41	54
KOTA PALANGKA RAYA	10	6	2	1	19	51	19	5	2	77	96

KOTAWARINGIN BARAT	15	9	2	1	27	49	17	3	3	72	99
KOTAWARINGIN TIMUR	27	6	2	1	36	69	15	4	2	90	126
TOTAL	162	76	29	15	282	498	182	47	26	753	1035

Dari grafik dan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa fasilitasi sekolah untuk menuju SNP melalui program sekolah model/sekolah binaan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah menyentuh sebanyak 1.035 sekolah semua jenjang, artinya bahwa hampir semua sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengenal apa itu SPMI, SNP, dan peta mutu pendidikan.

3 FASILITASI SEKOLAH MELALUI PPK

Fasilitasi sekolah melalui kegiatan Penuatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam rangka peningkatan karakter baik siswa maupun warga sekolah. Pada tahun 2019, semua Kabupaten/kota dan semua jenjang SD, SMP, SMA dan SMK telah mengikuti kegiatan PPK.

FASILITASI MELALUI PPK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

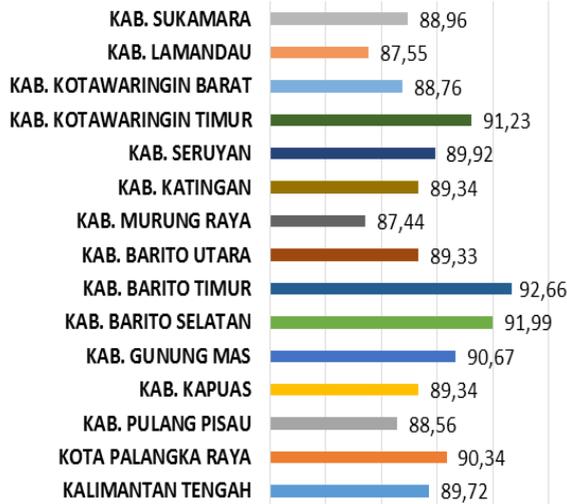


Jumlah Sekolah Kabupaten	Jenjang			
	SD	SMP	SMA	SMK
BARITO SELATAN	5	5	5	5
BARITO TIMUR	5	5	5	5
BARITO UTARA	5	5	6	5
GUNUNG MAS	5	5	5	4
KAPUAS	5	5	5	6
KATINGAN	5	5	5	5
KOTAWARINGIN BARAT	5	5	5	7
KOTAWARINGIN TIMUR	5	5	5	8
LAMANDAU	5	5	5	5
MURUNG RAYA	5	5	5	1
PALANGKA RAYA	5	5	5	6
PULANG PISAU	5	5	4	5
SERUYAN	5	5	5	5
SUKAMARA	5	5	5	3
Total	70	70	70	70

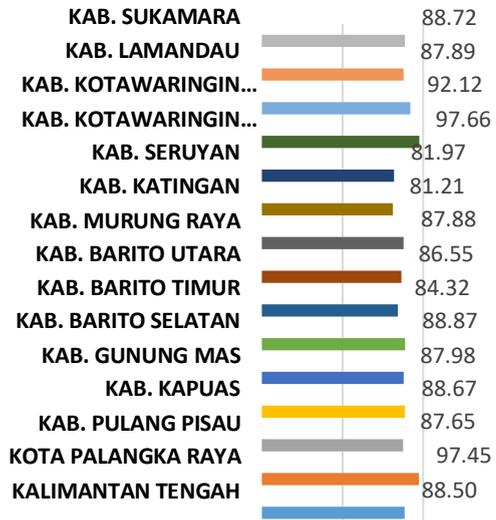
4 FASILITASI SEKOLAH MELALUI SUPERVISI

Supervisi Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa peningkatan mutu satuan pendidikan telah berjalan dengan baik, maka pada tahun 2019 BPMP Provinsi Kalimantan Tengah melakukan supervisi ke satuan pendidikan melalui pelibatan pengawas sekolah yang difokuskan pada implementasi Kurikulum 2013, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan literasi. Ketiga fokus supervisi ini dipayungi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

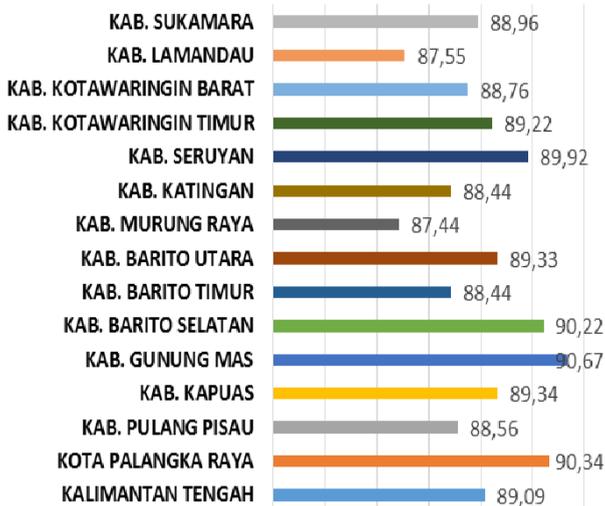
PERSENTASE JENJANG SD YANG TELAH DISUPERVISI



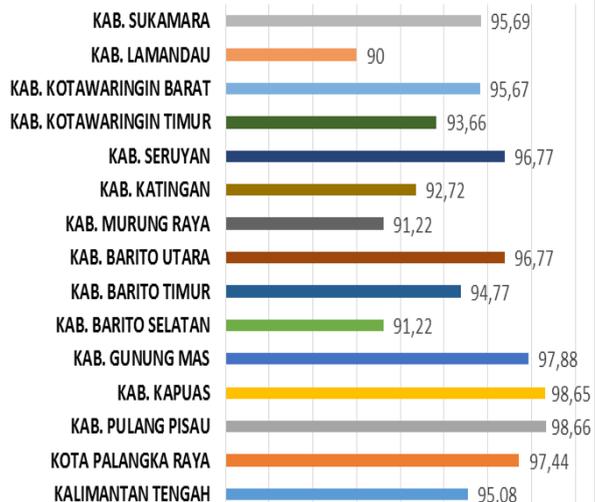
PERSENTASE JENJANG SMP YANG TELAH DISUPERVISI



PERSENTASE JENJANG SMA YANG TELAH DISUPERVISI



PERSENTASE JENJANG SMK YANG TELAH DISUPERVISI



Supervisi satuan pendidikan dilaksanakan pada aspek :

1. Pemahaman Standar Mutu & Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Supervisi Penjaminan Mutu Pelaksanaan Manajemen Sekolah
3. Supervisi Penjaminan Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran
4. Supervisi Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pada Peningkatan Kompetensi Lulusan

Supervisi jenjang SD dilaksanakan di 2.367 satuan pendidikan, SMP dilaksanakan di 740 satuan pendidikan, SMA dilaksanakan di 215 satuan pendidikan, SMK dilaksanakan di 129 satuan pendidikan.

4. Tata Kelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil tatakelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah selama kurung waktu 5 tahun adalah pencapaian nilai SAKIP minimal BB.

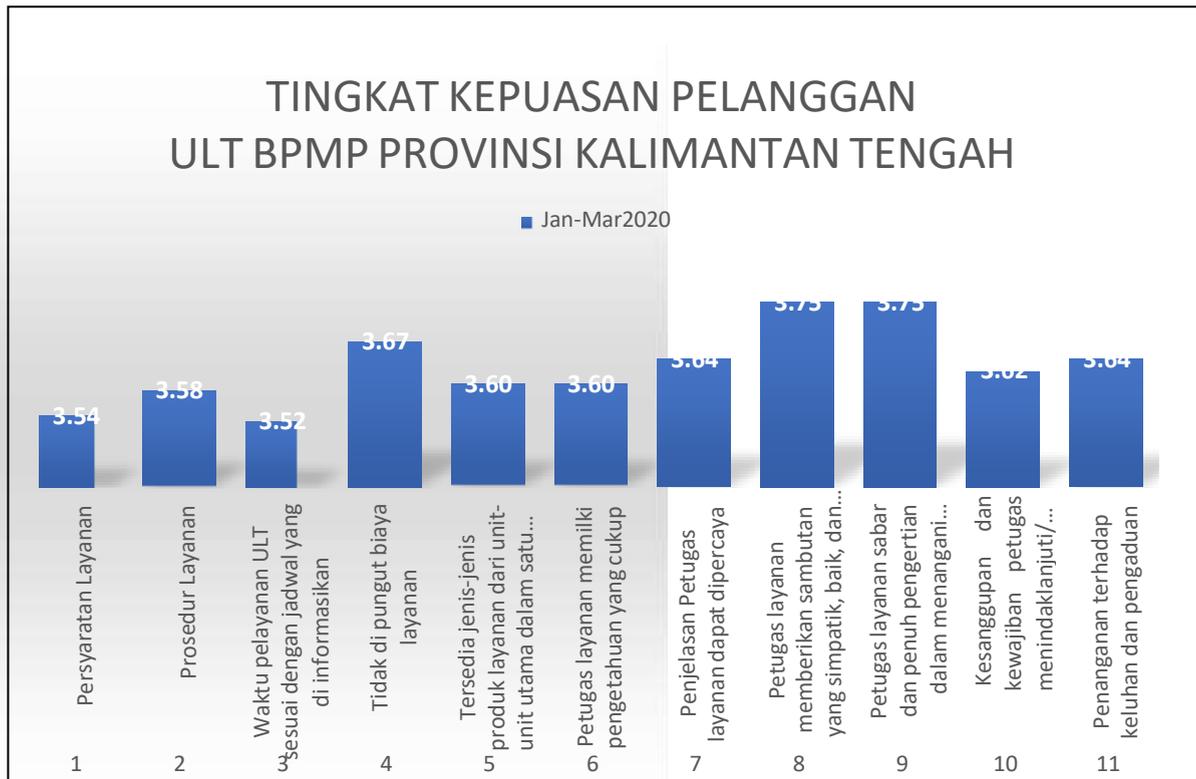
Selain itu pula penataan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melalui Unit Layanan Terpadu (ULT), yang mana sudah berjalan mulai dari Tahun 2016, berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan dapat disampaikan sebagai berikut.

Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tim ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah tahun Desember 2018 – Maret 2020 adalah sebagai berikut :

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN ULT LPMP KALIMANTAN TENGAH						
No	Pernyataan	Rata-rata Tingkat Kepuasan Pelanggan				
		Des2018-Mar2019	Apr-Jun2019	Jul-Sep2019	Okt-Des2019	Jan-Mar2020
1	Persyaratan Layanan	3.47	3.89	3.55	3.80	3.54
2	Prosedur Layanan	3.53	3.77	3.57	3.70	3.58
3	Waktu pelayanan: Waktu pelayanan ULT sesuai dengan jadwal yang di Informasikan	3.43	3.55	3.49	3.55	3.52
4	Biaya/tarif: Tidak di pungut biaya layanan	3.15	3.80	3.57	3.65	3.67
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan: Tersedia jenis-jenis produk layanan dari unit-unit utama dalam satu pintu layanan terpadu	3.37	3.52	3.51	3.60	3.60
6	Kompetensi pelaksana: - Petugas layanan memiliki pengetahuan yang cukup - Penjelasan Petugas layanan dapat dipercaya	3.54	3.62	3.59	3.60	3.60
		2.63	3.68	3.56	3.55	3.64
7	Perilaku pelaksana - Petugas layanan memberikan sambutan yang simpatik, baik, dan ramah terhadap Tamu/pemohon dalam menyampaikan permasalahannya - Petugas layanan sabar dan penuh pengertian dalam menangani Tamu/pemohon	3.70	3.71	3.69	3.70	3.75
		3.52	3.77	3.68	3.75	3.75
8	Maklumat pelayanan Kesanggupan dan kewajiban petugas merindakan/juti/ menyelesaikan permohonan	3.48	3.63	3.46	3.65	3.62
9	Pengelolaan pengaduan: Penanganan terhadap keluhan dan pengaduan	3.27	3.63	3.52	3.70	3.64

Keterangan
 Sangat Baik = 4
 Baik = 3
 Buruk = 2
 Sangat Buruk = 1

Pada pengolahan hasil survey periode Januari sampai dengan Maret 2020 dengan 84 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner, dapat dilihat hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tim ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ULT BPMP Kalimantan Tengah periode Januari – Maret 2020, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kategori Baik dengan rerata 3,63. Skor terendah terdapat pada aspek Waktu pelayanan dengan skor 3,52.

Berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dirasa perlu untuk menetapkan target capaian dalam 5 tahun kedepan, diantaranya :

- a. Peningkatan keterampilan dalam menyusun standar layanan ULT,
- b. Peningkatan disiplin petugas terhadap ketepatan waktu dalam hal jadwal layanan ULT,
- c. Peningkatan pengetahuan terhadap jenis layanan ULT,
- d. Peningkatan kemampuan dalam berkomunikasi,
- e. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada (mesin antrian elektronik).

Target-target ini dapat dicapai dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Mengadakan pelatihan penyusunan standar layanan bagi petugas ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah,
- b. Mengadakan pelatihan pelayanan prima bagi petugas ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah,
- c. Menetapkan jadwal rapat rutin guna berbagi informasi terbaru bagi petugas ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah,
- d. Pengadaan mesin antrian elektronik.

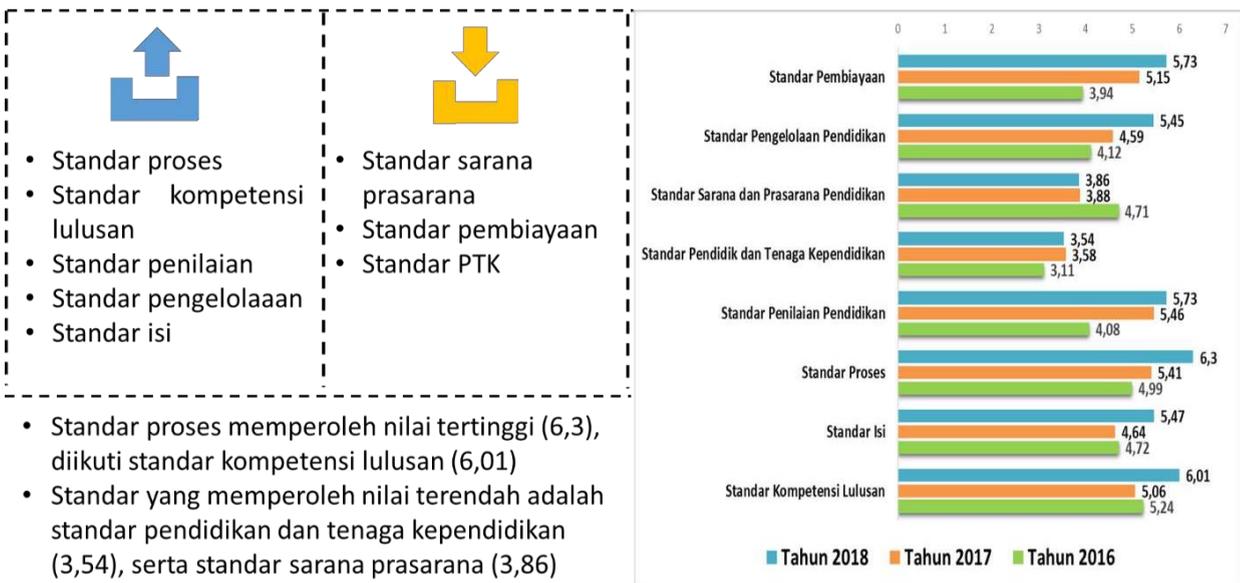
1.2. PERMASALAHAN DAN POTENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti peningkatan rata-rata capaian rapor mutu, program Implementasi Kurikulum 2013, Sekolah menuju SNP (Sekolah model/binaan), Pengembangan PPK, dan Supervisi satuan pendidikan, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya BPMP Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Hasil capaian mutu satuan pendidikan belum mencapai standar

Mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) masih jauh dari Standar Nasional Pendidikan. Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Tahun 2018 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

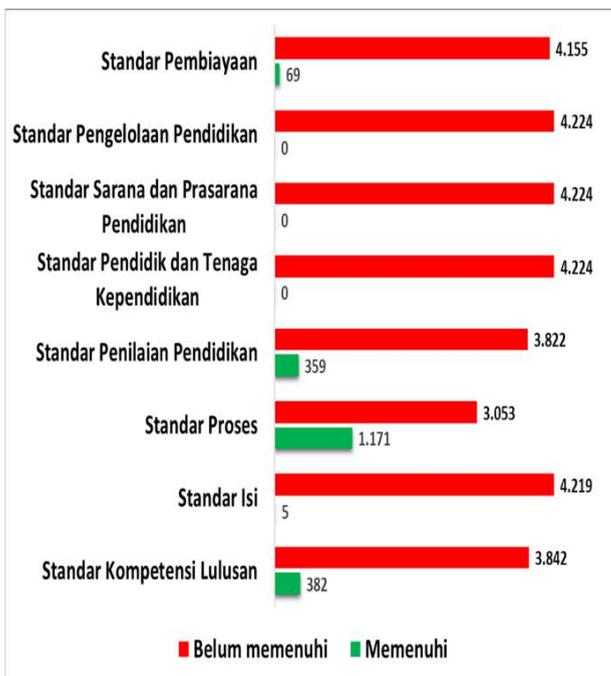
TREN CAPAIAN SNP JENJANG SD PADA SETIAP STANDAR



Berdasarkan tren capaian per standar nasional pendidikan dari 8 SNP terdapat **peningkatan pada 5 standar**, sedangkan yang mengalami **penurunan pada 2 standar yaitu standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan**. Penurunan capaian SNP pada beberapa standar terdapat pada beberapa aspek yang memerlukan intervensi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komitmen sekolah dalam pemenuhannya.

JUMLAH SEKOLAH YANG MEMENUHI SNP PER STANDAR

- Berdasarkan capaian per standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), menunjukkan bahwa ada sekolah yang telah memenuhi beberapa standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Jumlah SD terbanyak memenuhi standar proses sejumlah 1.171 sekolah
- Belum ada SD yang memenuhi standar PTK, standar pengelolaan dan standar sarana prasarana, karena pemenuhan beberapa standar tersebut membutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota



(2) Ancaman dalam pembangunan karakter siswa (Hasil AKM Siswa atau SKL rendah)

**Data Mutu dan Relevansi Hasil Belajar
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
A.1	Kemampuan literasi		Data belum tersedia
A.2	Kemampuan numerasi		Data belum tersedia
A.3	Karakter		Data belum tersedia

Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	1.65	Di bawah kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	1.53	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Karakter	2.05	Berkembang

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	1.72	Di bawah kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	1.64	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Karakter	2.05	Berkembang

Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
A.1	Kemampuan literasi	1.86	Mencapai kompetensi minimum
A.2	Kemampuan numerasi	1.69	Di bawah kompetensi minimum
A.3	Karakter	2.18	Berkembang

*) Data Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

ANCAMAN NYATA GENERASI BANGSA

Diisi 4,5 juta jiwa pengguna media sosial, 70 persennya adalah pelajar dan 22 persen pelajar. Media lebih sedikit, pengguna media sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa sampai dikawatirkan oleh BIN.

DARURAT NARKOBA

CYBER CRIME

HOAX

RADIKALISME/TERORISME EKSTREMISME

TAWARAN PELAJAR

Bullying

Exclusion, Embarrassment, Kicking, Intimidation, Name-Calling, Pinching, Mean Looks, Stealing, Threats, Teasing, Shoving, Rumors, Mean Notes, Harassment, Hitting, Cyberbullying, Destroying Things, Assault, Bystander, Exclusion.

WHAT THE INTERNET IS DOING TO OUR BRAINS
THE SHALLOWS
Nicholas Carr
THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

EDITORIAL
Menganalisis Gerakan Terorisme dan Radikalisme di Kampus

ANCAMAN NYATA KEKERASAN DAN RADIKALISME



4/1/2019-2017

FENOMENA RADIKALISME YANG MENGANCAM DUNIA PENDIDIKAN



1. Sekolah dijadikan sebagai tempat menyebarkan radikalisme/terorisme melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas : melalui buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler/kegiatan, dan pertemuan-pertemuan.
2. Beberapa kejadian sekolah, guru, dan siswa menghindari kegiatan upacara bendera dan pelajaran kewarganegaraan/sejarah.
3. Pola penyebaran paham kekerasan semakin kuat melalui media on-line, media sosial dan media internet lainnya yang sangat dekat dengan kehidupan siswa.
2. Beberapa kejadian tindak radikalisme dilakukan langsung oleh pelajar (usia sekolah) :
 - a. Kasus teror di Klaten dan Solo (2011), (2015);
 - b. Kasus di Medan (2016);
 - c. Kasus anak SMA berangkat ke Syria di Jakarta (2016);
 - d. Video anak-anak Indonesia di Syria (2016)
 - e. **Kasus Rentetan Teror di Surabaya (Mei, 2018)**



Sources : dari berbagai sumber/NUA 2016-2017

(3) Data pokok pendidikan yang kurang akurat

Kondisi Pendidik di Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang bertujuan untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi professional, diperoleh hasil bahwa kompetensi guru untuk setiap jenjang masih rendah, begitu pula dengan hasil uji kompetensi Kepala Sekolah. Adapun hasil Uji Kompetensi Guru dapat dilihat pada data berikut di bawah ini:

Data Mutu dan Relevansi Pembelajaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
D.1	Perencanaan untuk Proses Pembelajaran yang Efektif	-	Data Terbaru Belum Tersedia
D.2	Pendekatan Pembelajaran yang Sesuai untuk Anak Usia Dini	-	Data Terbaru Belum Tersedia
D.3	Muatan Pengembangan yang Sesuai Kurikulum	-	Data Terbaru Belum Tersedia
D.4	Asesmen yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	Data Terbaru Belum Tersedia

Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
D.1	Kualitas pembelajaran	1.87	Terarah
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	1.63	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	1.48	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	2.14	Waspada
D.5	Kesenjangan iklim keamanan sekolah	2.5	Tidak ada kesenjangan
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	2.14	Merintis
D.7	Kesenjangan Iklm Kesetaraan Gender	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.8	Iklm Kebinekaan	2.14	Merintis
D.9	Kesenjangan Iklm Kebinekaan	2.5	Tidak ada kesenjangan
D.10	Iklm Inklusivitas	1.93	Merintis
D.11	Kesenjangan Iklm Inklusivitas	2.5	Tidak ada kesenjangan
D.12	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah	3.93	Kecil
D.13	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah	18.66	Sedang
D.14	Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.15	Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
D.1	Kualitas pembelajaran	1.89	Terarah
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	1.65	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	1.52	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	2.28	Aman
D.5	Kesenjangan iklim keamanan sekolah	3	Tidak ada kesenjangan
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	2.15	Merintis
D.7	Kesenjangan Iklm Kesetaraan Gender	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.8	Iklm Kebinekaan	2.2	Merintis
D.9	Kesenjangan Iklm Kebinekaan	3	Tidak ada kesenjangan
D.10	Iklm Inklusivitas	1.95	Merintis
D.11	Kesenjangan Iklm Inklusivitas	3	Tidak ada kesenjangan
D.12	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah	5.29	Kecil

D.13	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah	15.39	Sedang
D.14	Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.15	Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia

Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Provinsi Anda	Capaian
D.1	Kualitas pembelajaran	1.93	Terarah
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	1.66	Pasif
D.3	Kepemimpinan instruksional	1.5	Terbatas
D.4	Iklm keamanan sekolah	2.39	Aman
D.5	Kesenjangan iklim keamanan sekolah	3	Tidak ada kesenjangan
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	2.22	Merintis
D.7	Kesenjangan Iklm Kesetaraan Gender	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.8	Iklm Kebinekaan	2.25	Membudaya
D.9	Kesenjangan Iklm Kebinekaan	3	Tidak ada kesenjangan
D.10	Iklm Inklusivitas	1.92	Merintis
D.11	Kesenjangan Iklm Inklusivitas	3	Tidak ada kesenjangan
D.12	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.13	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.14	Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia
D.15	Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia

*) Data Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Untuk menjawab permasalahan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP, maka BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis 2020-2024. Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan program dan kegiatan penguatan daya saing pada tingkat nasional dan melanjutkan target periode sebelumnya yang belum selesai, yaitu sertifikasi pendidik, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui proses pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi peta mutu satuan pendidikan dan

fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan untuk mencapai SNP. Fasilitas peningkatan mutu standar satuan pendidikan lebih difokuskan pada implementasi kurikulum ke seluruh jenjang pendidikan secara bertahap. Implementasi kurikulum minimal akan meningkatkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK dan standar kompetensi lulusan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun beberapa potensi yang dapat menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

(1) Data Pendidikan Daerah

Data Pendidikan Daerah akan menampilkan jumlah siswa, guru, kelas dan sekolah per jenjang pendidikan formal dan nonformal. Jumlah pendidik formal yang ditampilkan adalah kategori guru aktif, yaitu guru yang memiliki sekolah induk dan pembelajaran, atau guru yang tidak memiliki sekolah induk namun memiliki pembelajaran dengan jumlah jam mengajar minimal 6 jam. Gambar dibawah ini merupakan data pendidikan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.



Sumber : <http://jendela.data.kemdikbud.go.id>, Agustus 2020

Rekapitulasi Data Sekolah Berdasarkan Jenjang Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Datamart Dapodik 05/02/2020

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Kab. Barito Selatan	163	62	23	5	2	255
Kab. Barito Timur	146	28	11	6	1	192
Kab. Barito Utara	175	39	15	8	1	238
Kab. Gunung Mas	178	59	14	4	1	256
Kab. Kapuas	401	120	20	18	2	561
Kab. Katingan	212	81	23	9	2	327
Kab. Kotawaringin Barat	189	60	12	17	2	280
Kab. Kotawaringin Timur	369	107	23	24	5	528
Kab. Lamandau	110	42	11	11	1	175
Kab. Murung Raya	173	67	24	1	2	267
Kab. Pulang Pisau	183	43	19	8	1	254
Kab. Seruyan	167	66	13	7	1	254
Kab. Sukamara	50	14	5	3		72
Kota Palangka Raya	119	48	27	16	3	213
Jumlah	2.635	836	240	137	24	3.872

Rekapitulasi Data PTK Berdasarkan Jenjang Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Datamart Dapodik 05/02/2020

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Kab. Barito Selatan	1.611	547	363	133	25	2.679
Kab. Barito Timur	1.568	525	274	178	9	2.554
Kab. Barito Utara	1.842	584	305	202	24	2.957
Kab. Gunung Mas	1.599	569	291	78	7	2.544
Kab. Kapuas	3.683	1.201	420	324	22	5.650
Kab. Katingan	1.638	742	342	145	24	2.891
Kab. Kotawaringin Barat	1.779	745	308	343	26	3.201
Kab. Kotawaringin Timur	3.502	1.179	478	479	39	5.677
Kab. Lamandau	905	368	171	121	12	1.577
Kab. Murung Raya	1.460	565	316	30	18	2.389
Kab. Pulang Pisau	1.608	533	334	125	12	2.612
Kab. Seruyan	1.624	669	204	153	13	2.663
Kab. Sukamara	580	232	131	72		1.015
Kota Palangka Raya	1.723	854	712	481	86	3.856
Jumlah	25.122	9.313	4.649	2.864	317	42.265

Rekapitulasi Data PTK Berdasarkan Usia Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Datamart Dapodik 05/02/2020

Kabupaten/Kota	<20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	Jumlah
Kab. Barito Selatan	-	376	930	625	728	20		2.679
Kab. Barito Timur	-	369	951	569	650	15		2.554
Kab. Barito Utara	1	442	944	777	778	15		2.957
Kab. Gunung Mas	1	367	1.026	523	621	6		2.544
Kab. Kapuas	11	1.037	1.564	1.227	1.775	35	1	5.650
Kab. Katingan	4	455	981	663	771	17		2.891
Kab. Kotawaringin Barat	-	601	1.092	613	872	22	1	3.201
Kab. Kotawaringin Timur	5	1.218	1.968	1.121	1.338	27		5.677
Kab. Lamandau	-	206	650	455	263	3		1.577
Kab. Murung Raya	2	379	959	683	363	3		2.389
Kab. Pulang Pisau	3	359	839	603	800	8		2.612
Kab. Seruyan	3	636	1.190	544	287	3		2.663
Kab. Sukamara	-	185	472	232	125	1		1.015
Kota Palangka Raya	1	518	991	939	1.361	46		3.856
Jumlah	31	7.148	14.557	9.574	10.732	221	2	42.265

Rekapitulasi Data PTK Berdasarkan Jenis PTK Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Datamart Dapodik 05/02/2020

Kabupaten/Kota	Guru Kelas	Guru Mapel	Kepala Sekolah	Jumlah
Kab. Barito Selatan	1.041	1.411	227	2.679
Kab. Barito Timur	964	1.412	178	2.554
Kab. Barito Utara	1.212	1.509	236	2.957
Kab. Gunung Mas	1.062	1.228	254	2.544
Kab. Kapuas	2.379	2.773	498	5.650
Kab. Katingan	1.127	1.494	270	2.891
Kab. Kotawaringin Barat	1.283	1.657	261	3.201
Kab. Kotawaringin Timur	2.478	2.684	515	5.677
Kab. Lamandau	686	776	115	1.577
Kab. Murung Raya	1.080	1.033	276	2.389
Kab. Pulang Pisau	955	1.416	241	2.612
Kab. Seruyan	1.106	1.336	221	2.663
Kab. Sukamara	376	571	68	1.015
Kota Palangka Raya	1.132	2.511	213	3.856
Jumlah	16.881	21.811	3.573	42.265

(5) Rasio Pendidikan

Rasio pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah menggambarkan rasio guru dengan siswa, rasio rombel dengan siswa, rasio PNS dengan siswa dan rasio kelas dengan siswa, sebagai berikut :

A. RASIO GURU : SISWA

SD	11.61
SMP	12.19
SMA	13.08
SMK	12.57
PLB	3.66

B. RASIO ROMBEL : SISWA

SD	17.22
SMP	24.59
SMA	23.03
SMK	21.17
PLB	3.64

C. RASIO GURU SERTIFIKASI : SISWA

SD	25.3
SMP	32.85
SMA	34.33
SMK	41.39
PLB	10.36

D. RUANG KELAS : SISWA

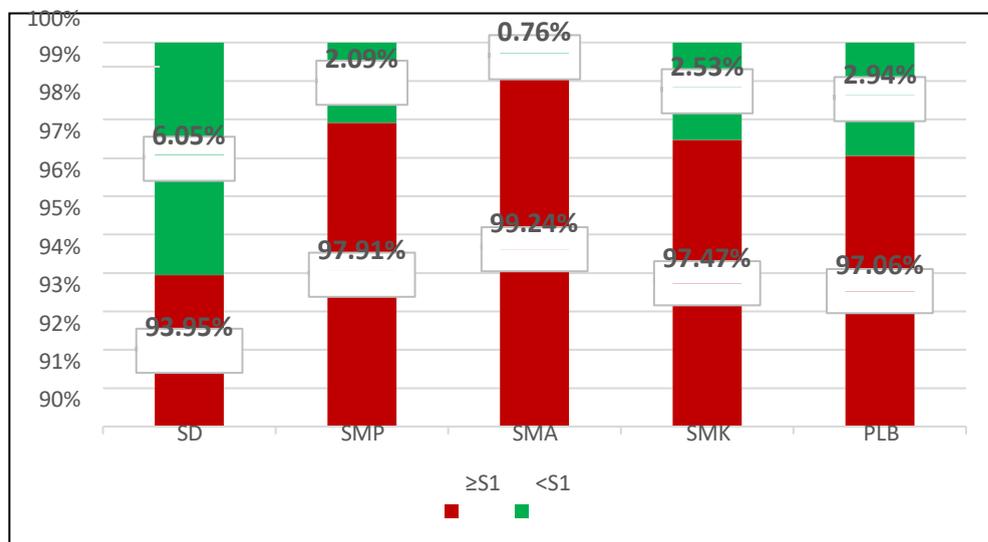
SD	17.66
SMP	23.73
SMA	25.9
SMK	23.9
PLB	5.52

Sumber : <http://jendela.data.kemdikbud.go.id>, Agustus 2020

Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS sehingga belum menggambarkan kondisi riil dan penyebarannya secara merata di seluruh daerah.

(6) Kualifikasi Pendidikan Guru

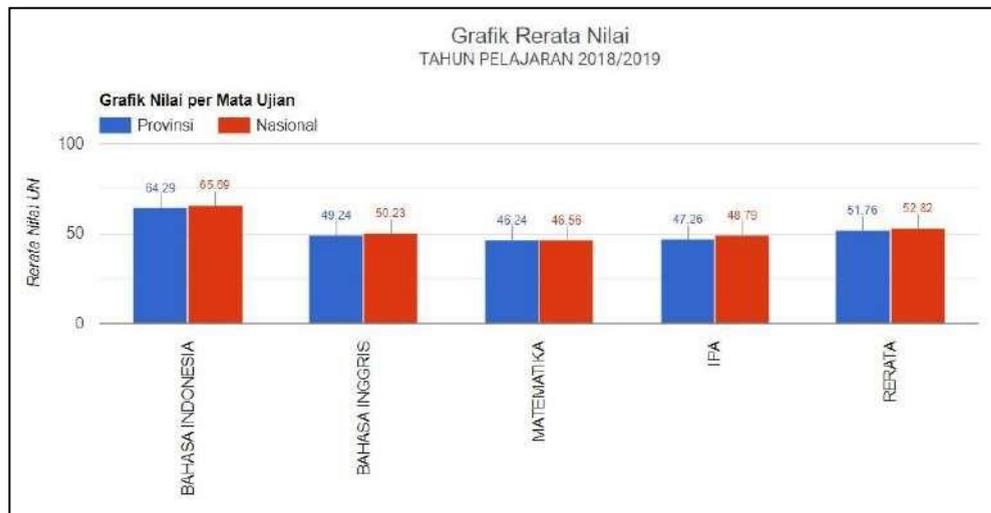
Sesuai dengan standar nasional pendidikan menetapkan bahwa kualifikasi seluruh guru minimal S1 atau D4. Kondisi kualifikasi guru di Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : <http://jendela.data.kemdikbud.go.id>, Agustus 2020

Gambar diatas menunjukkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 per jenjang pendidikan pada tahun 2020. Untuk jenjang SD sebanyak 93,95% guru berkualifikasi minimal D4/S1; jenjang SMP sebanyak 97,91% guru berkualifikasi minimal D4/S1; jenjang SMA sebanyak 99,24% guru berkualifikasi minimal D4/S1; jenjang SMK sebanyak 97,47% guru berkualifikasi minimal D4/S1; dan jenjang PLB sebanyak 97,06% guru berkualifikasi minimal D4/S1. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1 ada di jenjang SMA.

(7) Hasil Ujian Nasional



Sumber: <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>

CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL JENJANG SMP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	KODE	NAMA PROVINSI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKA	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
					BAHASA INDONESIA	BAHASA	MATEMATIKA	IPA	
1	01	DKI JAKARTA	1055	115404	74	62,74	54,82	57,11	62,17
2	02	JAWA BARAT	5049	566406	65,78	52,16	47,41	48,92	53,57
3	03	JAWA TENGAH	3241	388253	72,52	52,47	51,36	54,61	57,74
4	04	DI YOGYAKARTA	440	42382	78,71	60,04	61,97	62,4	65,78
5	05	JAWA TIMUR	4560	403345	69,32	52,98	49,69	52,84	56,21
6	06	ACEH	1096	60753	54,13	42,97	38,81	41	44,23
7	07	SUMATERA UTARA	2480	213563	60,26	47,85	44,2	45,6	49,48
8	08	SUMATERA BARAT	799	68456	68,78	48,32	47,11	49,63	53,46
9	09	RIAU	1154	84808	66,42	49,4	47,44	48,84	53,03
10	10	JAMBI	662	41191	61,6	46,04	41,98	44,56	48,55
11	11	SUMATERA SELATAN	1290	114072	58,57	43,99	40,5	42,06	46,28
12	12	LAMPUNG	1308	101590	62,96	44,85	40,62	43,62	48,01
13	13	KALIMANTAN BARAT	1259	74305	62,8	45,34	40,82	43,05	48,00
14	14	KALIMANTAN TENGAH	805	34683	64,29	49,24	46,24	47,26	51,76
15	15	KALIMANTAN SELATAN	594	38291	67,02	49,7	42,6	47,59	51,73

Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL JENJANG SMA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

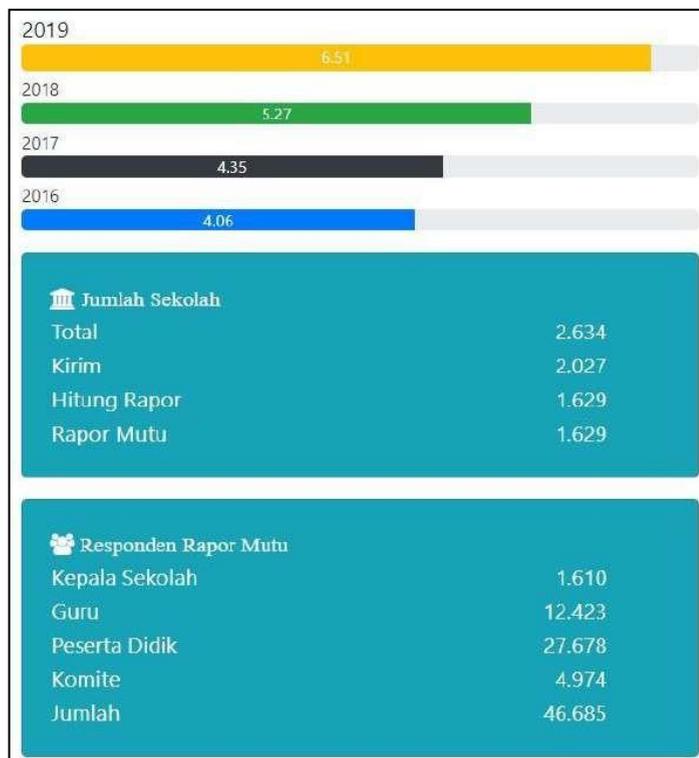
NO	KODE	NAMA PROVINSI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI						RERATA NILAI
					BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	FISIKA	KIMIA	BIOLOGI	
1	01	DKI JAKARTA	434	28105	80,69	75,43	53,76	61,5	62,91	62,07	67,99
2	02	JAWA BARAT	1275	122603	71,81	56,73	39,3	45,23	50,69	50,8	54,43
3	03	JAWA TENGAH	714	73317	79,09	61,06	46,57	53,02	58,04	58,78	61,09
4	04	DI YOGYAKARTA	138	10743	82,84	70,12	52,67	56,74	62,07	64,13	66,91
5	05	JAWA TIMUR	1078	97595	74,69	58,92	43,39	49,53	55,22	56,12	57,98
6	06	ACEH	492	28328	56,33	41,69	32,52	38,02	41,37	42,53	43,11
7	07	SUMATERA UTARA	943	69001	62,63	48,64	36,95	41,98	47,93	46,5	48,57
8	08	SUMATERA BARAT	285	24218	73,09	53,23	41,36	47,32	52,53	52,6	54,89
9	09	RIAU	362	23866	69,19	51	37,49	42,79	48,25	49,39	51,52
10	10	JAMBI	176	12153	66,76	48,94	36,37	42,15	46,62	48,26	49,82
11	11	SUMATERA SELATAN	471	33266	63,62	47,12	35,52	40,78	46,23	46,99	48,12
12	12	LAMPUNG	347	25080	69,13	49,25	36,63	42,55	47,59	49,07	50,81
13	13	KALIMANTAN BARAT	301	14443	70,04	50,85	36,74	43,6	49,23	49,04	51,51
14	14	KALIMANTAN TENGAH	182	8429	67,1	48,06	33,69	39,01	44,59	46,93	48,64
15	15	KALIMANTAN SELATAN	170	10122	74,86	53,01	37,73	44,34	49,32	52,47	54,14

CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL JENJANG
SMK TAHUN PELAJARAN 2018/2019

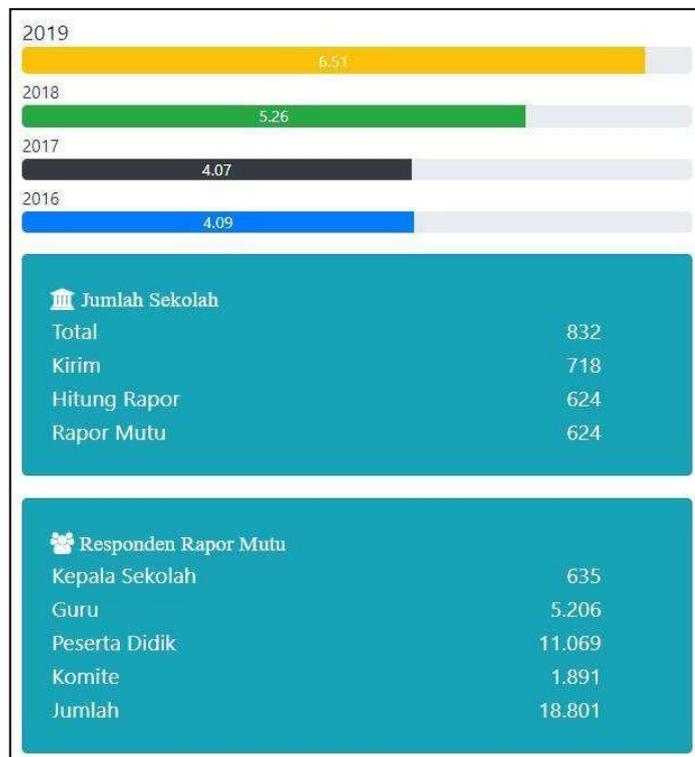
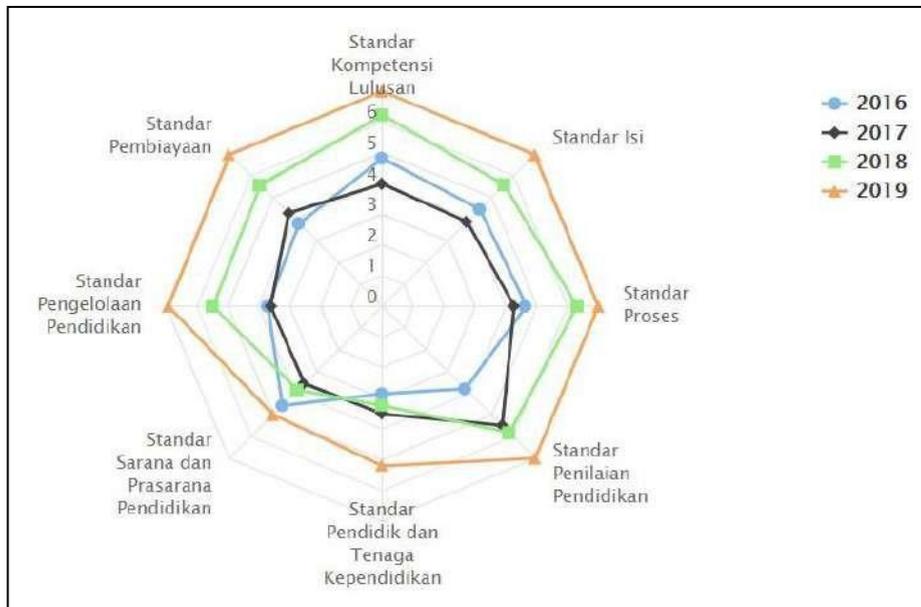
NO	KODE	NAMA PROVINSI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
					BAHASA INDONESIA	BAHASA	MATEMATIKA	KOMPETENSI	
1	1	DKI JAKARTA	577	68793	70,42	48,11	40,05	47,06	51,41
2	2	JAWA BARAT	2809	321148	64,95	41,44	33,89	43,07	45,84
3	3	JAWA TENGAH	1534	246436	72,56	44,48	39,57	46,98	50,90
4	4	DI YOGYAKARTA	216	28152	76,88	49,47	44,09	50,86	55,33
5	5	JAWA TIMUR	1937	229476	68,87	42,99	36,43	45,93	48,56
6	6	ACEH	202	15872	56,9	36,34	31,43	39,98	41,16
7	7	SUMATERA UTARA	957	89282	58,22	38,3	33,67	40,84	42,76
8	8	SUMATERA BARAT	202	26470	66,75	39,86	35,53	45,58	46,93
9	9	RIAU	280	28692	65,44	40,51	34,56	44,45	46,24
10	10	JAMBI	170	14891	61,63	37,67	32,43	41,63	43,34
11	11	SUMATERA SELATAN	287	33410	60,15	37,16	31,96	40,34	42,40
12	12	LAMPUNG	459	42771	64,79	38,3	32,88	42,97	44,74
13	13	KALIMANTAN BARAT	195	19763	64,39	39,49	33,5	42,59	44,99
14	14	KALIMANTAN TENGAH	131	10191	63,29	38,41	32,1	41,56	43,84
15	15	KALIMANTAN SELATAN	121	17239	67,77	42,91	33,94	44,94	47,39

(8) Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan

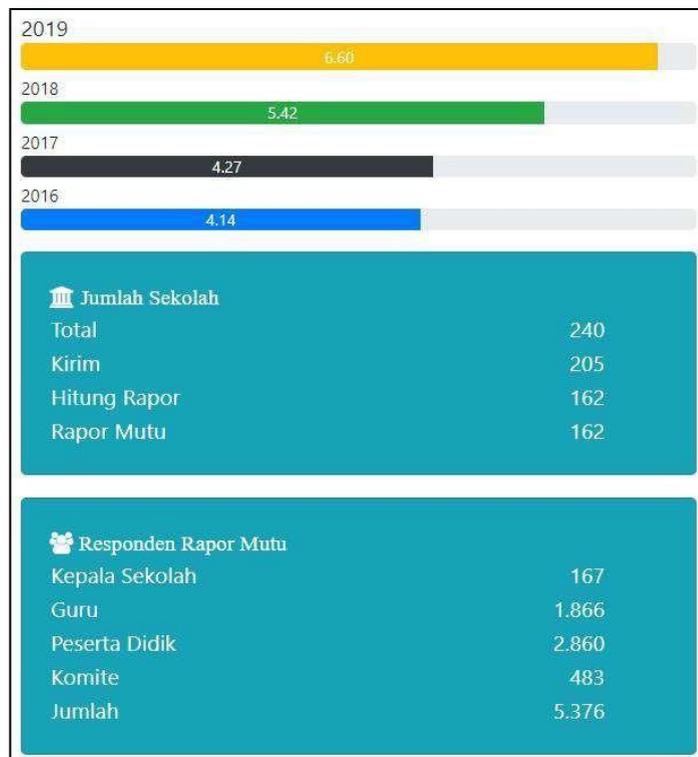
**RAPOR MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JENJANG SD**



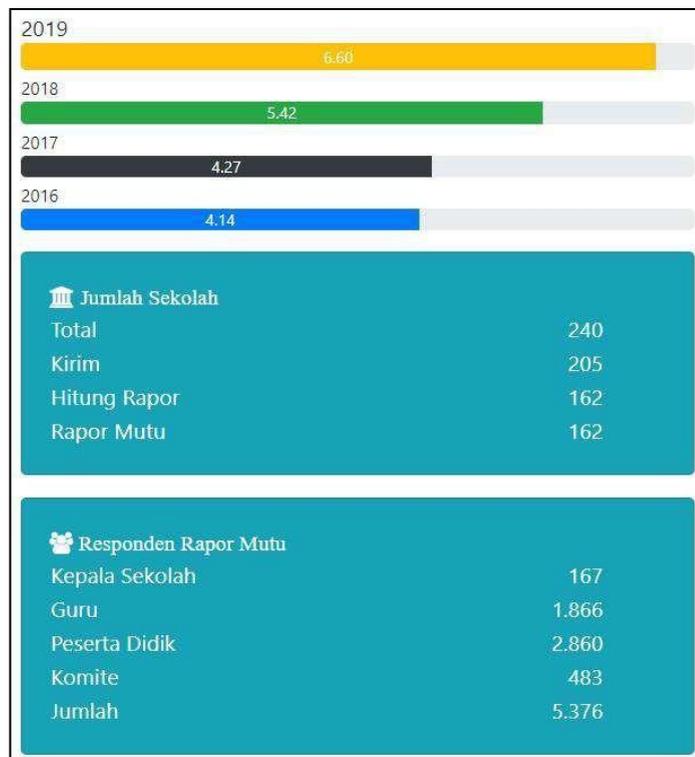
RAPOR MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JENJANG SMP



RAPOR MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JENJANG SMA



RAPOR MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JENJANG SMK



(9) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*asesmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (*visitasi*) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen evaluasi diri (*self-evaluation*), dengan maksud agar suatu Sekolah/Madrasah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, Sekolah/Madrasah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*quality continues improvement*). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah/madrasah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, dengan peringkat A, B, C dan tidak terakreditasi.

Peringkat akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi sekolah/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut :

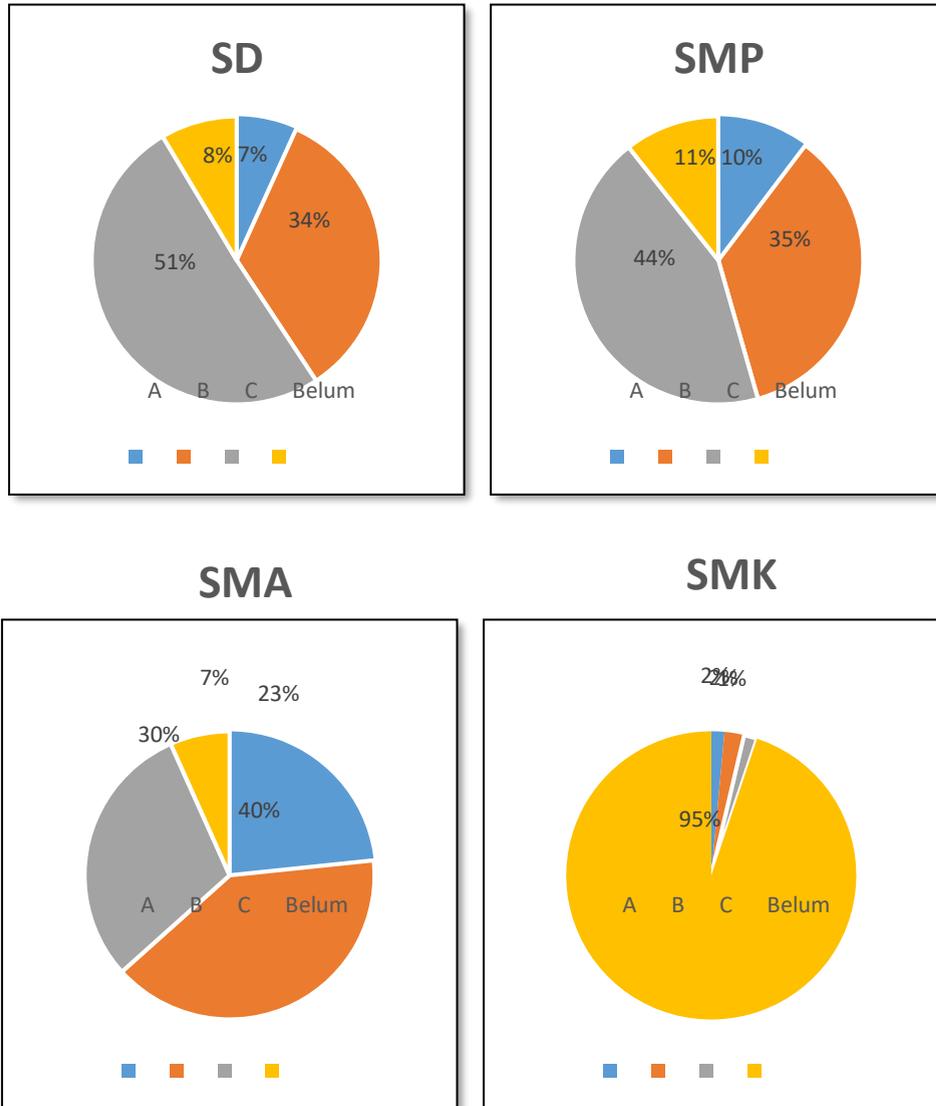
1. Peringkat Akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$).
2. Peringkat Akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 \leq NA \leq 90$).
3. Peringkat Akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 \leq NA \leq 80$).

Sekolah Tidak Terakreditasi

Sekolah/Madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir :

- a. Nilai akhir 61 sampai dengan 70 ($61 \leq NA \leq 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang);
- b. Nilai Akhir 0 sampai dengan 60 ($0 \leq NA \leq 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

Satuan Pendidikan Menurut Akreditasi, Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : <http://jendela.data.kemdikbud.go.id>, Agustus 2020

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam melaksanakan Perencanaan Strategis lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta kegiatan lembaga yang merupakan satu kesatuan yang utuh menghasilkan rencana strategis lembaga.

2.1. VISI

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengemban tugas peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah, maka BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menentukan visi berdasarkan visi Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai wujud dukungan visi dan misi unit kerja atasannya. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:

BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dalam peningkatan SDM yang berkualitas melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabel, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, pelaksanaan peningkatan dan penjaminan mutu akan mengedepankan inovasi dan kolaborasi guna mencapai capaian pembelajaran siswa yang maksimal.

2.2. MISI

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

2.3. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan tata nilai untuk dijadikan dasar dan arah bagi sikap dan perilaku bagi seluruh ASN Kemendikbudristek termasuk BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu.

BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.4. TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah selaku unit kerja atasannya, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024.

Dikarenakan ada perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan tujuan strategisnya pun mengalami perubahan. Di bawah ini diuraikan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan strategis untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

Rumusan Tujuan Strategis Periode 2020-2021 (Periode LPMP)

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2021
TS1	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai kinerja sekolah minimum 75	27,4%
TS2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Kalimantan Tengah	Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Tengah	BB

Rumusan Tujuan Strategis Periode 2022-2024 (Periode BPMP)

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	75
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	A

Sesuai dengan kebijakan penyusunan Renstra di lingkungan Kemendikbudristek dan untuk mengetahui *cascading* kinerja yang jelas mulai tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, sampai unit kerja eselon II/UPT, maka rumusan tujuan strategis yang ditetapkan BBPMP Provinsi Jawa Tengah diambil dari salah satu Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP.

2.5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Agar tujuan strategis yang ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai, dirumuskanlah sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Sasaran kegiatan yang dirumuskan tersebut adalah sasaran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

Dikarenakan ada perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatannyapun mengalami perubahan. Di bawah ini diuraikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

Sasaran Kegiatan dan IKK periode 2020-2021 (Periode LPMP)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
TS1	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75
			IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
			IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah

			akurat, terbaru dan berkelanjutan
TS2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Jawa Tengah	SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Jawa Tengah IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL

Sasaran Kegiatan dan IKK Periode 2022-2024 (Periode BPMP)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	SK1.Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	SK2 Meningkatkan tata kelola BPMP Kalimantan Tengah	IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah

**Definisi Operasional dan Metode Perhitungan IKK tercantum dalam lampiran*

2.6 Target Capaian Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sedang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Ada delapan area perubahan yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Komitmen besar itu ditunjukkan dengan mengupayakan agar BPMP Provinsi Jawa Tengah dapat memperoleh predikat ZI WBK pada tahun 2020-2024

Untuk merealisasikan target menjadi satuan kerja berpredikat ZI WBK, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target capaian reformasi birokrasi selama 2020-2024 yaitu:

TARGET CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI BPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Indikator Capaian	Satuan	Target				
			2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Jumlah Perubahan/inovasi yang dibuat agen perubahan dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	Jumlah	2	4	11	12	13
2	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	%	4	3	2	1	1

No	Indikator Capaian	Satuan	Target				
			2020*	2021*	2022	2023	2024
3	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	%	80	90	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	90	92	94	96	98
5	Rata-rata kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat	Hari	10	8	6	4	2
6	Persentase pelayanan telah dipermudah (waktu lebih cepat, alur lebih pendek, terintegrasi dengan aplikasi):	%	80	82	86	90	92

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2020—2024 dan hasil evaluasi capaian BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020—2024 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan semangat gotong royong. Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2020—2024.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh BPMP Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020-2024 dengan fokus kebijakan sebagai berikut :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
6. Pembangunan ZI WBK; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi BPMP.

3.2. STRATEGI

Dalam mewujudkan Rencana Strategis dalam Renstra BPMP Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan strategi berdasarkan masing-masing

komponen yang menjadi tugas dan fungsi BPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Strategi Pencapaian Sasaran

No.	Komponen	Strategi
1.	Pemetaan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dan peningkatan indeks efektivitas secara bertahap dan berkelanjutan pada: a. Satuan pendidikan SD b. Satuan pendidikan SMP c. Satuan Pendidikan SMA
2.	Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Melaksanakan Fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan pada: a. Satuan Pendidikan SD b. Satuan Pendidikan SMP c. Satuan Pendidikan SMA
3.	Supervisi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Melaksanakan supervisi mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan pada: a. Satuan Pendidikan SD b. Satuan Pendidikan SMP c. Satuan Pendidikan SMA
4.	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Melaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan: a. Pengembangan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah b. Pengelolaan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
	Pelaksanaan urusan	Melaksanakan urusan administrasi secara akuntabel, transparan, dan efektif dalam rangka

5.	Administrasi	peningkatan : a. Nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Mengimplementasikan Riformasi Birokrasi dalam segala aspek guna menciptakan Zona Integrasi Wilayah Bersih dari Korupsi.

3.3. KERANGKA REGULASI

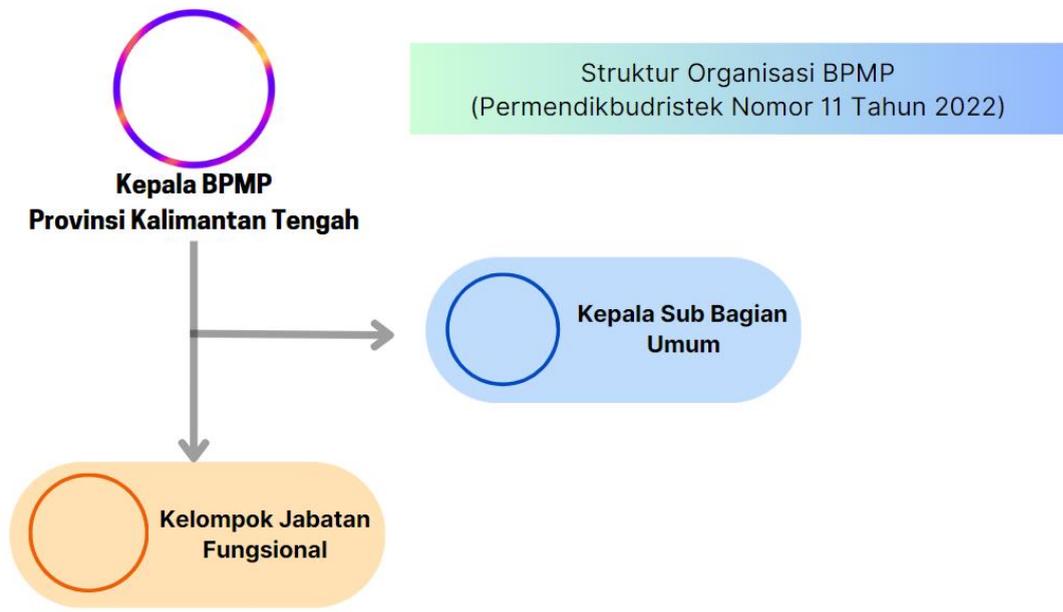
Regulasi yang menjadi dasar hukum keberadaan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Kerangka regulasi lain yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN



TUGAS BPMP

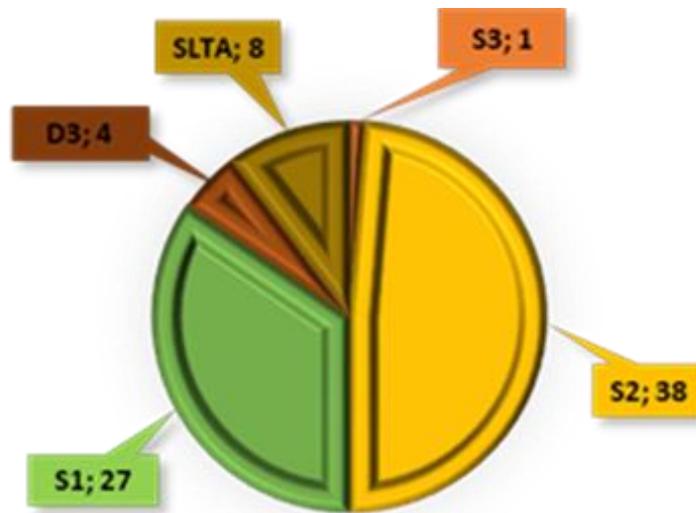
melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi

FUNGSI BPMP

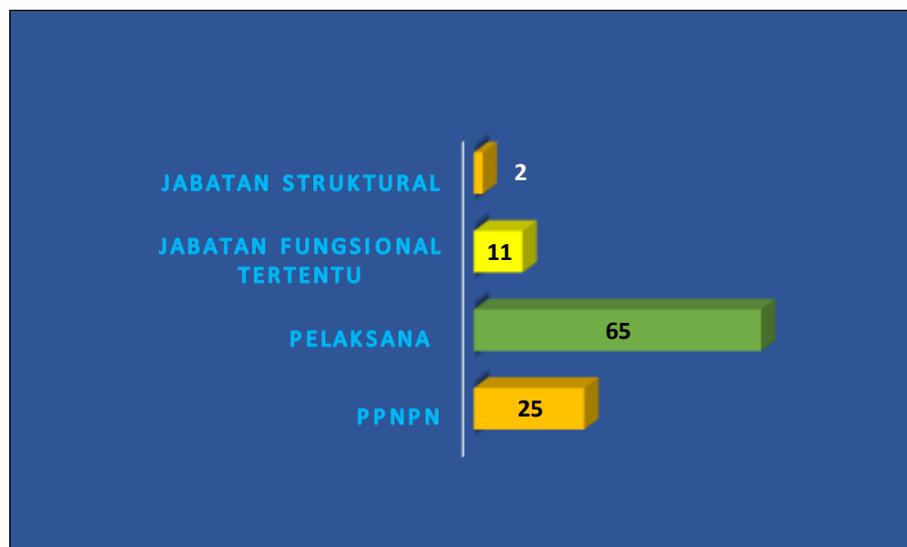
- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan masyarakat;
- Pengembangan model penjaminan danm peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

- pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi.

SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan



SDM berdasarkan Jabatan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat perioderencana pembangunan jangka menengah. Periode 2005--2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem pendidikan. Periode 2010--2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat regional. Periode 2015--2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat nasional. Periode 2020--2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Pada periode tahun 2015--2019 kebijakan perencanaan program melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja di lingkungan Kemendikbud, diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional dengan melanjutkan target periode sebelumnya yang belum selesai, yaitu sertifikasi pendidik, penilaian kinerja guru, penguatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui proses pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi peta mutu satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan untuk mencapai SNP. Fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan lebih difokuskan pada implementasi kurikulum ke seluruh jenjang pendidikan secara bertahap. Implementasi kurikulum minimal akan meningkatkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, dan standar kompetensi lulusan. Khusus untuk standar PTK bagi satuan pendidikan kejuruan dipersyaratkan memiliki sertifikat kompetensi keahlian di bidangnya sehingga mampu menghasilkan lulusan sekolah kejuruan yang berkompentensi dan mampu bersaing di tingkat regional.

Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan program dan kegiatan penguatan daya saing pada tingkat regional dan melanjutkan target periode sebelumnya yang belum selesai, yaitu sertifikasi pendidik, penilaian kinerja guru, penguatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui proses pemetaan mutu satuan

pendidikan, supervisi peta mutu satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan untuk mencapai SNP. Fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan lebih difokuskan pada implementasi kurikulum ke seluruh jenjang pendidikan secara bertahap. Implementasi kurikulum minimal akan meningkatkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK dan standar kompetensi lulusan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

BPMP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Target kinerja ditetapkan pada setiap IKK.

Dikarenakan ada perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, dibawah ini diuraikan target kinerja masing-masing IKK untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

Target Kinerja IKK Periode 2020-2021 (Periode LPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET (%)	
	2020	2021
SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan		
IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	26,5	27,4
IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5
IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2
SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik		
IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Tengah	BB	BB
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	82

Target Kinerja IKK Periode 2022-2024 (Periode BBPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET (%)		
	2022	2023	2024
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98	1,96	3,92
IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	30	35
SK2. Meningkatnya tata kelola BPMP Kalimantan Tengah			
IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	A	A	A
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	83	90	90

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun sebagai perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target-target yang ditetapkan. Berikut proyeksi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pencapaian target yang ditetapkan selama periode Renstra 2020-2024.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan (jutaan)				
	2020*	2021*	2022	2023	2024
Total Kebutuhan Anggaran BPMP Provinsi Kalteng 2020-2024	29.950	32.875	34.891	38.865	42.768

(* Periode LPMP)

Kerangka Pendanaan IKK Periode 2022-2024 (Periode LPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rencana Pendanaan (jutaan)	
	2020	2021
SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	17.970	19.725
IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75		
IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk		
IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan		
SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	11.980	13.150
IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Tengah		
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL		

Kerangka Pendanaan IKK Periode 2022-2024 (Periode BPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan (jutaan)		
	2022	2023	2024
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	20.935	23.319	25.660
IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya			
IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)			
SK2. Meningkatnya tata kelola BPMP Kalimantan Tengah	13.956	15.546	17.108
IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah			
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah			

BAB V PENUTUP

Rencana strategis BPMP Provinsi Kalimantan Tengah disusun ini pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan strategis lembaga, dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2020. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMP akan lebih efektif, efisien, berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi saat ini yang dihadapi satuan kerja baik internal maupun eksternal.

Faktor ketidakpastian situasi dan kondisi, tuntutan konsumen dan pihak-pihak berkepentingan yang dinamis lebih menuntut program-program strategis yang implementatif, mempunyai ketepatan yang tinggi, jelas dan terukur dan mengakibatkan jangka waktu perencanaan strategis yang dibuat makin pendek (cepat berubah) serta perlu disesuaikan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam penyusunan renstra ini juga memperhatikan Instruksi Mendikbud tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fleksibilitas sangat memungkinkan setiap tahun untuk disempurnakan sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi strategis yang terjadi, berdasarkan data dan kondisi riil saat itu serta hasil evaluasi tahunan yang dilakukan melalui hasil monitoring dan evaluasi (ME) sehingga terjadi *continuous improvement* dalam penyusunan program kerja tahunan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah .

Penyusunan Renstra ini merupakan *grand strategic* lima tahun kedepan yang bertujuan untuk melakukan penjaminan mutu mutu pendidikan di Provinsi dalam rangka mencapai tujuan nasional pendidikan. Penyusunan Renstra secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Renstra adalah salah satu wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dari ditetapkannya rencana strategis Lembaga maka akan dapat dilakukan penilaian kinerja berupa pengukuran kinerja

yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Lembaga. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan strategis lembaga.

Semoga Rencana Strategis ini dapat membantu BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga terjadi sinkronisasi rencana dengan pelaksanaannya dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi sehingga terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong sesuai dengan Visi BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN

**Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan
IKK Periode 2020-2021 (Periode LPMP)**

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TARGET (%)		Rencana Pendanaan (jutaan)	
	2020	2021	2020	2021
SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			17.970	19.725
IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	26,5	27,4		
IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5		
IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2		
SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik			11.980	13.150
IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Tengah	BB	BB		
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	82		

IKK Periode 2022-2024 (Periode BPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET (%)			Rencana Pendanaan (jutaan)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				20.935	23.319	25.660
IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98	1,96	3,92			
IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	30	35			
SK2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah				13.956	15.546	17.108
IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	A	A	A			
IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	83	90	90			

**Lampiran 2: Definisi Operasional Indikator Kinerja
IKK Periode 2020-2021 (Periode LPMP)**

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			
<p>IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75</p>	<p>Pada tahun 2020 perhitungan masih menggunakan indeks mutu.</p> <p>Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.</p> <p>Baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.</p>	<p>Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari pengisian laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>Dengan sistem skor 19,0 – 34,2 sangat rendah 35,2 – 50,4 rendah 51,4 – 65,5 cukup 66,6 – 81,8 sangat tinggi 82,8 – 95,0 sempurna</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	<p>Sumber Data: Laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>Unit Pelaksana LPMP</p> <p>*berdasarkan matriks renstra Kemdikbud 20-24 LPMP masih menggunakan indeks mutu</p>

<p>IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk</p>	<p>Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Target pelaksanaan AKM adalah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang.</p> <p>Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survey karakter</p> <p>Survey dilakukan pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>Survey karakter mengukur: 1) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual, 2) kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta 3) praktik</p>	<p>$\% = \frac{(\sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM} + \sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter})}{(\sum \text{siswa yang mengikuti survey AKM} + \sum \text{siswa yang mengikuti survey karakter})} \times 100\%$</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	<p>Sumber data: Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter</p> <p>Unit pelaksana: LPMP, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang</p>
--	---	--	---

	<p>pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah</p> <p>Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah.</p> <p>AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter</p>		
<p>IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan</p>	<p>Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbudristek yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik.</p> <p>Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data) x100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) x100% 3. terbaru: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron 	<p>Sumber data: Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online</p> <p>Unit Pelaksana: LPMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin</p>

	<p>Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p>	<p>data/jumlah satuan pendidikan) x100%</p> <p>4. $\Sigma (1+2+3)/3$</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	
<p>SK 2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik</p>			
<p>IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Kalimantan Tengah</p>	<p>Predikat SAKIP adalah Predikat yang menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di LPMP Kalimantan Tengah yang penilaiannya dilakukan oleh Biro Perencanaan Bersama ITJEN Kemendikbudristek</p>	<p>Satuan = Kualitatif (AA, A, BB, B, CC, C, dan D)</p> <p>Rumus: diperoleh langsung dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbudristek</p>	<p>Tipe perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: Biro Perencanaan, Kemendikbudristek</p>

IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan penggunaan anggaran atas pelaksanaan RKA di LPMP Kalimantan Tengah yang penilaiannya dilakukan oleh Kemenkeu	Satuan = Jumlah (kuantitas absolut) Rumus: diperoleh langsung dari hasil penilaian yang dilakukan Kemenkeu pada aplikasi Smart	Tipe perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: aplikasi eSmart, DJA Kemenkeu
---	--	--	---

IKK Periode 2022-2024 (Periode BPMP)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUDDikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing (di Provinsi Kalimantan yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar.	<p>Satuan: Persen (%) Tipe perhitungan: non kumulatif</p> <p>Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah satuan PAUD dan Dikmas di Jawa Tengah}} \times 100$	<p>Sumber Data: Rapor pendidikan, Setditjen PAUDDIKDASMEN, BPMP</p> <p>Unit Pelaksana BPMP</p> <p>Periode Pengumpulan data: Tahunan</p>

<p>IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)</p>	<p>Persentase dari provinsi/kabupaten /kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.</p>	<p>Satuan: Persen (%) Tipe perhitungan: non kumulatif</p> <p>Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah satuan dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah satuan Dikdas dan Dikmen di Provinsi Jawa Tengah}} \times 10$ <p>Satuan pendidikan yang dihitung adalah sekolah SD, SMP, SMA, dan SLB</p>	<p>Sumber Data: Rapor pendidikan, Setditjen PAUDDIKDASMEN</p> <p>Unit Pelaksana BPMP</p> <p>Periode Pengumpulan data: Tahunan</p>
<p>SK2. Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah</p>			
<p>IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Kalimantan Tengah</p>	<p>Predikat SAKIP adalah Predikat yang menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di BPMP Kalimantan Tengah</p>	<p>Satuan = Kualitatif (Predikat)</p> <p>Rumus: <i>Nilai SAKIP</i> = [<i>Perencanaan Kinerja</i>] + [<i>Pengukuran kinerja</i>]</p>	<p>Tipe perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data:</p>

yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

+[Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

(Diperoleh langsung dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek, yaitu Itjen Kemendikbud)

Nilai	Predikat	Interprestasi
>90-100	AA	Sangat memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Biro Perencanaan dan Itjen Kemendikbudristek

Periode Pengumpulan data: Tahunan

<p>IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:</p>	<p>Satuan = Kategori</p> <p>Rumus: $Nilai\ Kinerja\ Anggaran = [60\% \times Nilai\ EKA] + [40\% \times Nilai\ IKPA]$</p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART DJA Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM-SPAN</p> <table border="1" data-bbox="1115 614 1659 1034"> <thead> <tr> <th>Nilai Kinerja Anggaran</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90%</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>80%-90%</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>60%-80%</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>>50%-60%</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>>50%</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori	>90%	Sangat Baik	>80%-90%	Baik	>60%-80%	Cukup	>50%-60%	Kurang	>50%	Sangat Kurang	<p>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: SPASIKITA (terintegrasi dengan smart DJA)</p> <p>Periode Pengumpulan data: Bulanan</p>
Nilai Kinerja Anggaran	Kategori														
>90%	Sangat Baik														
>80%-90%	Baik														
>60%-80%	Cukup														
>50%-60%	Kurang														
>50%	Sangat Kurang														

	<p>1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA);</p> <p>2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).</p> <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p>		
--	--	--	--

***PENYELARASAN* INDIKATOR KINERJA**
BPMP PROV. KALIMANTAN TENGAH

TINGKAT KEMENTERIAN (MENTERI)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi seluruh jenjang	IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum a. Literasi b. Numerasi
SS 5 Meningkatnya tata kelola Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	IKSS 5.1 Opini Laporan keuangan IKSS 5.3 Predikat SAKP Kemdikbudristek

TINGKAT DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN (DIRJEN)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

BPMP KALIMANTAN TENGAH (KEPALA BPMP)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya IKK1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
SK2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	IKK2.1 Predikat SAKIP BBPMP Provinsi Jawa Tengah IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Tengah



BPMP KALIMANTAN TENGAH (KEPALA BPMP)

